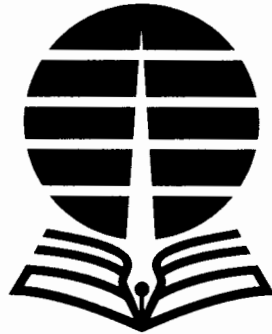


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP
AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA PNPM MANDIRI
DI KECAMATANSIMEULUE TENGAH
KABUPATEN SIMEULUE**



UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

MON ERIK FERDIAN

NIM. 500012885

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2015

ABSTRAK

PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA PNPM MANDIRI DI KECAMATAN SIMEULUE TENGAH KABUPATEN SIMEULUE

Oleh :

Mon Erik Ferdian

Pengawasan dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan agar suatu pekerjaan efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Maka tentunya fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mencerminkan bahwa secara tidak langsung pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaksanaan penyaluran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengungkap besarnya pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatori (explanatory survey). Rujukan teori pengawasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan menurut Winardi (2000: 259) yang mengatakan kesuksesan pengawasan terdiri dari pengawasan pendahuluan (preliminary control), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (concurrent control), pengawasan feed back (feed back control).

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas Penyaluran Dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.

ABSTRACT***INFLUENCE THE SUPERVISION OF ACCOUNTABILITY DISTRIBUTION FUNDS OF NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN SIMEULUE TENGAH SUB-DISTRICT SIMEULUE REGENCY***

By:

Mon Erik ferdian

Supervision is understood as the activities carried out in order for a job effectively and efficiently in accordance with a predetermined plan. So of course the phenomena that occur in the field related to the National Community Empowerment Program reflect that indirectly affect of supervision accountability distribution funds of the National Program for Community Empowerment.

The problem in this study is how much influence supervision of accountability distribution funds of the National Community Empowerment Program in simeulue tengah Sub-District. The research objective was to determine the magnitude the supervision effect of accountability distribution funds of the National Program for Community Empowerment (PNPM) in simeulue tengah sub-district.

The reverence of supervision theory used was by Winardi (2000: 259) that supervision success consists of (preliminary control), (concurrent control), and (feed back control).

Based on the results of the discussion can be concluded that the supervision was take affect of accoutability distribution funds of the National Program for Community Empowerment in simeulue tengah sub-district simeulue regancy.



PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Pengaruh Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Penyaluran Dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue

Penyusun TAPM : Mon Erik Ferdian

NIM : 500012855

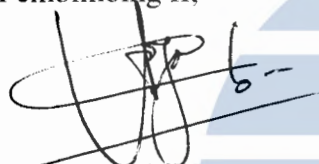
Program Studi : Administrasi Publik

Hari/ Tanggal : Sabtu / 12 September 2015

Menyetujui :

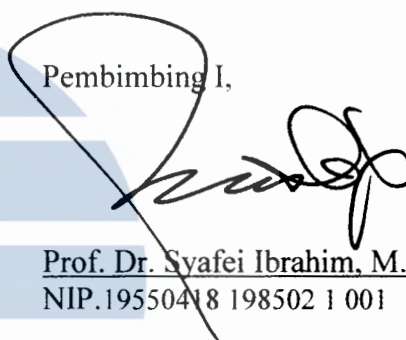
PANITIA PENGUJI TAPM

Pembimbing II,



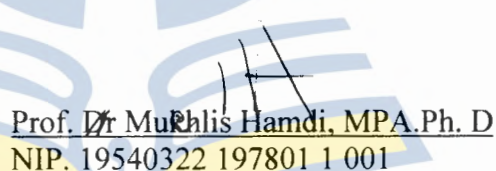
Nama: Dr. Tri Darmayanti, M.A
NIP. 1960041019 890 32 001

Pembimbing I,



Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M.Si
NIP.19550418 198502 1 001

Penguji Ahli



Prof. Dr. Mughlis Hamdi, MPA.Ph. D
NIP. 19540322 197801 1 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik
Program Pascasarjana

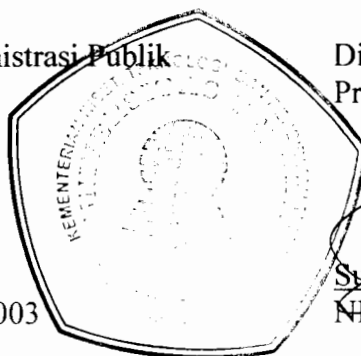


Dr. Darmanto, M. Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur
Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc, Ph. D
NIP. 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa :

Nama/NIM : Mon Erik Ferdian/ 500012855

Judul TAPM : Pengaruh Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Penyaluran Dana PNPB Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru*) selesai sekitar.....% sehingga dinyatakan sudah layak uji/belum layak uji dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Pembimbing II

Dr. Tri Darmayanti, M.A
NIP. 1960041019 890 32 001

....., 2015

Pembimbing I

Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M.Si
NIP. 19550418 198502 1 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Pengaruh Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Penyaluran Dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 12 September 2015
Yang Menyatakan



(Mon Erik Ferdian)
NIM, 500012855

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Mon Erik Ferdian
 NIM : 500012855
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul TAPM : Pengaruh Pengawasan Terhadap Akuntabilitas
 Penyaluran Dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue
 Tengah Kabupaten Simeulue

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Pada:

Hari/Tanggal : Sabtu 12 September 2015

Waktu : 14.15 – 16.15

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komosi Penguji


Nama: Dr. Yuni Tri Hewindati

Tandatangan

.....


Penguji Ahli

Nama: Prof. ~~Dr~~ Mukhlis Hamdi, MPA, Ph. D

.....


Pembimbing I

Nama: Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M.Si

Pembimbing II

Nama: Dr. Tri Darmayanti, M.A

.....

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah'hirabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Swt atas berkat, rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan (TAPM) Tesis ini. Tanpa pertolongan NYA mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik. TAPM ini disusun untuk mengetahui, menganalisis dan mengungkap besarnya pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue, agar pelaksanaan PNPM Mandiri tepat sasaran dan untuk mewujudkan misi yaitu meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya akuntabilitas pemerintahan daerah khususnya di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue perlu diimbangi dengan pengawasan yang baik agar pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri akuntabel. TAPM ini disusun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah, Swt akhirnya Laporan Studi Mandiri ini dapat terselesaikan. TAPM ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis merasa TAPM ini masih jauh dari sempurna, oleh karena keterbatasan waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad serta rasa keingintahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Studi Mandiri ini. Penulis sangat menyadari, bahwa

TAPM ini dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima dengan baik dalam studi maupun dari tahap penulisan sampai TAPM ini selesai tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka dan membantu penulis saat penelitian guna penulisan TAPM ini, antara lain:

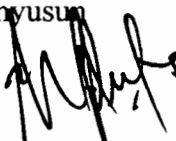
1. Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D selaku direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka
2. Ibu Drs. Enang Rusyana, M.Pd selaku Kepala UPBJJ Banda Aceh Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan TAPM ini.
3. Bapak Dr. Sofjan Arifin, M,Si selaku Asisten Direktur Kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
4. Bapak Prof. Dr Mukhlis Hamdi, MPA.Ph. D selaku Pembimbing I, terima kasih atas waktu, tenaga serta pikiran dan dengan penuh kesabarannya untuk memberikan bimbingan, masukan-masukan, serta pengarahan hingga terselesainya TAPM ini.
5. Bapak Prof. Dr. Syafei Ibrahim,M.Si selaku Pembimbing I, terima kasih atas waktu, tenaga serta pikiran dan dengan penuh kesabarannya untuk memberikan bimbingan, masukan-masukan, serta pengarahan hingga terselesainya TAPM ini.

6. Ibu Dr. Tri Darmayanti, M.A selaku pembimbing II mata kuliah studi mandiri dengan kesabarannya membimbing penulis, memberikan masukan masukan, serta arahan-arahan hingga terselesainya laporan TAPM ini.
7. Ibu Drs. Mariana, M.Pd selaku Koordinator Program Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ Banda Aceh yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam proses pembimbingan kepada penulis hingga TAPM ini terwujud.
8. Isteri tercinta Tiharlisna Amd.Kep yang tersayang anakku Callysta Azzahra yang telah banyak memberikan inspirasi, semangat, doa, pengorbanan dan bahkan setia menemani penulis hingga larut malam dalam menyelesaikan Laporan Studi Mandiri ini.
9. Teman-teman se-angkatan pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Aceh pada umumnya dan khususnya Kelas Simeulue yang telah berbagi ilmu, pikiran, masukan melalui diskusi dan debat panjang sehingga TAPM ini bisa terselesaikan tepat waktu.

Mohon maaf dengan segala kekurangan dan harapan penulis semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh, Juli 2015

Penyusun



(Mon Erik Ferdian)

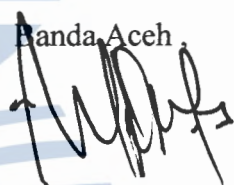
RIWATA HIDUP

Nama : Mon Erik Ferdian
NIM : 500012855
Tempat/Tanggal Lahir : Putra Jaya, 05 April 1983

Riwayat Pendidikan : Lulus SD Negeri Putra Jaya di Simeulue
pada tahun 1995 Lulus
SLTP Negeri 3 Simeulue Tengah di Simeulue
pada tahun 1998
Lulus SMK Muhammadiyah 1 di Banda Aceh
pada tahun 2001
Lulus S1 IAI AL-AQIDAH di Jakarta pada tahun
2009

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2010 s/d 2015 sebagai staf di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue

Banda Aceh, Juli 2015



Mon Erik Ferdian
NIM. 50012855

DAFTAR ISI

Keterangan	Halaman
Lembar judul.....	i
Abstrak	ii
Abstract.....	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar layak Uji.....	v
Lembar pernyataan.....	vi
Lembar Pengesahan	vii
Kata Pengantar	viii
Riwayat Hidup	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Kegunaan Dalam Pengembangan Ilmu.....	7
2. Kegunaan Dalam Peraktek.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritik	9
1. Teori Dan Konsep Pengawasan.....	11
2. Tipe- Tipe Pengawasan	15
3. Konsep Akuntabilitas.....	19
B. Kerangka Berpikir	32
C. Hipotesis.....	33

a. Uji Normalitas.....	62
b. Uji heteroskedaritas.....	65
c. Uji multikolinearitas.....	66
d. Uji autokorelasi.....	67
e. Regresi linear berganda.....	68
f. Uji koefisien determinasi (R^2).....	71
E. Uji Hipotesis Secara Parsial (Satu Persatu).....	72
F. Uji Variabel Pakai Tabel Anova	77
G. Pembahasan.....	80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR LAMPIRAN.....	97
Lampiran 1 Kuesioner	97
Lampiran 2 Data Ordinal Hasil Penilaian Responden Variabel Pengawasan.....	100
Lampiran 3 Data Ordinal Hasil Penilaian Responden Variabel Akuntabilitas.....	102
Lampiran 4 Data Ordinal Hasil Penilaian Responden Tentang Pengawasan	104

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	35
B. Penentuan Informan.....	35
C. Definisi Konsep dan Operasional.....	37
D. Populasi dan sampel Penelitian.....	40
E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kuesioner.....	42
G. Metode Analisis.....	43
H. Jadwal Penelitian	44

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Objek Penelitian.....	45
B. Hasil Analisis Kuesioner.....	46
1. Hasil Analisis Validitas Variabel Pengawasan.....	46
2. Hasil Analisis Validitas Variabel Akuntabilitas.....	49
3. Hasil Analisis Validitas Variabel Pengawasan dan Akuntabilitas.....	51
C. Analisis Deskripti Variabel Penelitian.....	52
1. Variabel Pengawasan.....	53
a. Dimensi Pengawasan Pendahuluan.....	55
b. Dimensi Pengawasan Pada Waktu Kerja Berlangsung.....	57
c. Dimensi Pengawasan feed back.....	57
2. Variabel Akuntabilitas.....	58
a. Dimensi Akuntabilitas Politik.....	60
b. Dimensi Akuntabilitas Finansial.....	60
c. Dimensi Akuntabilitas Administratif.....	61
D. Pengujian Hipotesis.....	62
1. Pengujian Statistik Simultan.....	62

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka mendukung dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya memuat kebijakan otonomi yang didasarkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka diharapkan bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan menggunakan paradigma pemberdayaan dengan mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah memampukan atau memandirikan masyarakat. Semakin kuat kemampuan dan kemandirian masyarakat, diharapkan semakin banyak masalah yang mampu diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri.

Pemerintah Pusat sesuai dengan program pembangunan daerah memiliki sasaran untuk mewujudkan *good governance* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan umum. Melihat keadaan tersebut, Pemerintah Pusat memandang perlu untuk membuat suatu program pemberdayaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat secara mandiri dalam pembangunan di wilayahnya. Salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan

kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Pemerintah menganggap bahwa Desa/Kampung sebagai perangkat daerah terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu mendapat perhatian lebih dalam pendistribusian kewenangan terutama yang berkaitan dengan pembangunan mandiri di wilayahnya yang melibatkan langsung masyarakatnya baik secara individu maupun kelembagaan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Pedesaan adalah Bantuan Langsung Masyarakat untuk memacu kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri secara mandiri, yang sebelumnya telah direncanakan secara musyawarah mufakat oleh lembaga masyarakat. Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Pedesaan harus banyak melibatkan warga masyarakat sebagai pelaku dalam lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan lainnya.

Tujuan utama dari pelaksanaan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Pedesaan yaitu untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pembangunan wilayah kelurahan/pedesaan yang bertumpu pada masyarakat sendiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan lingkungan dan kegiatan sosial budaya, meningkatkan kinerja Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan/Desa, menggerakkan swadaya masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri dan menggerakkan partisipasi pembangunan di Kelurahan yang pada akhirnya bermuara untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Melalui program tersebut, terdapat tuntutan untuk memberdayakan masyarakat yang berbasis di komunitas Rukun Warga (RW) dan upaya

peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengatasi masalah yang ada secara mandiri berdasarkan prinsip-prinsip: demokratis, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, desentralisasi dan berkelanjutan. Untuk mencapai efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)–Mandiri Pedesaan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pelaksanaan pengawasan mutlak diperlukan.

Agar pelaksanaan PNPM Mandiri tepat sasaran untuk mewujudkan misi di atas yaitu meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya akuntabilitas pemerintahan daerah khususnya di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue perlu diimbangi dengan pengawasan yang baik agar pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dan akuntabel. Sebab tanpa pengawasan maka fungsi manajemen akan hampa. Sebagaimana dikemukakan BAPPENAS (2007:47) mengatakan bahwa "sistem pengawasan adalah salah satu bagian dari penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mengingat begitu banyak dan luasnya daerah kelurahan/kampung yang menerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)–Mandiri Pedesaan, ditambah adanya keterbatasan biaya, maka penulis membatasi lingkup penelitian pada Kecamatan Simeulue tengah Kabupaten Simeulue yang memiliki struktur sosial dan ekonomi yang heterogen dikarenakan bagian pusat ibukota dari kecamatan dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan survey dan penjajakan awal yang dilakukan penulis di Kecamatan Simeulue tengah Kabupaten Simeulue, ditemukan adanya permasalahan-permasalahan. Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi ketua UPK,

Bendahara dan Sekretarisnya pada tanggal 17 Januari 2013 perhitungan sementara penyelewengan dana SPP PNPM Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue tersebut sejumlah Rp. 1.037.395.261, dari Berita Acara tersebut terindikasi ada dana SPP Rp. 990.951.100 yang merupakan setoran dari kelompok SPP kepada pengurus UPK yang tidak dibukukan dalam buku kas SPP di tambah Rp. 349.036.000 melalui ketua UPK, Rp. 540.648.600 melalui bendahara UPK kemudian Rp. 99.493.500 melalui sekretaris UPK dan Rp. 1.773.00 melalui mantan sekretaris UPK juga tidak di setor ke rekening pengembalian SPP Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue, sementara masih ada sisa dana dari hasil temuan dugaan penyelewengan yang belum ditemukan tanda bukti kepada siapa kelompok SPP menyetorkannya di UPK. Akibat dari kasus penyelewengan dana SPP yang tidak kunjung P21 oleh pihak Kejaksaan Negeri Sinabang, sehingga alokasi dana PNPM Kecamatan Simeulue Tengah telah di belokir oleh Pemerintah Pusat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir oleh UPK PNPM MPd baik SPP maupun UEP yang terjadi di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue ditemui beberapa hal yang tidak semestinya terjadi yaitu:

- Adanya penambahan bunga pinjaman yang dibebankan kepada anggota/kelompok oleh oknum Pengurus kelompok/TPK/Kader atau sebutan lain untuk kepentingan pribadi, sehingga beban yang ditanggung oleh anggota kelompok dari bunga pinjaman menjadi tinggi. Sehingga esensi program yang tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu menjadi hilang. Masyarakat

miskin semakin tidak berdaya dengan tetap menjadi obyek sasaran keuntungan golongan tertentu saja.

- Pembentukan kelompok hanya semata-mata agar pinjamannya bisa dicairkan tanpa memperdulikan keterikatan dalam organisasi kelompoknya.
- Adanya pembiaran tunggakan pada kolektibilitas 2–4 sampai kepada kemacetan (Kolektibilitas 5). Hal ini dikarenakan penanganan tunggakan oleh UPK yang tidak jelas arahnya dan hanya dilakukan pada saat menjelang MAD (Sangsi Lokal).
- Adanya spesimen pada rekening operasional, SPP dan UEP hanya ditandatangani oleh 2 orang (ketua dan bendahara UPK). Menurut keterangan personil UPK bahwa ini dilakukan karena adanya instruksi dari persepsi yang merepotkan dengan adanya pergantian personil Fasilitator Kecamatan ataupun yang lainnya diluar UPK. Sehingga ini berakibat tidak adanya pengendalian pengelolaan dana oleh UPK.
- Adanya laporan dari masyarakat berkaitan pinjaman dikelompoknya yang menurutnya sudah lunas tapi di pembukuan UPK masih menyisahkan tunggakan/saldo pinjaman.
- Adanya permainan target pengembalian pinjaman pada Laporan Perkembangan Pinjaman yang tidak sesuai. Pinjaman yang seharusnya sudah ditarget tetapi tidak dilakukan penargetan pengembalian/angsuran.
- Adanya target pengembalian bunga pinjaman dari kelompok yang seharusnya ditarget penuh namun hal itu tidak dilakukan (seolah-olah kelompok sudah melunasi tunggakan bunga namun sebenarnya masih menyisahkan beberapa kali angsuran bunga yang belum disetor). Padahal pengembalian pokok sudah

penuh sesuai SPK namun pengembalian bunga ada yang hilang (misal 1 kali bunga di angsuran terakhir tidak disetorkan). Hal ini dilakukan karena adanya kebijakan yang tidak tertulis dari fasilitator terdahulu bahwa jika ada kelompok yang akan melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo tidak dikenakan beban bunga pinjaman dari sisa pinjamannya.

- Adanya realisasi pinjaman yang tidak sesuai dengan yang diterima pada kelompok peminjam (Mark Up nilai pinjaman).
- Adanya pencairan dana pinjaman kepada kelompok yang masih mempunyai tunggakan dikarenakan beberapa anggota sudah ada yang lunas dengan cara membentuk kelompok baru.
- Adanya pelanggaran aturan tanggung renteng oleh pengurus UPK dengan menerima angsuran anggota kelompok langsung ke UPK tanpa lewat pengurus kelompok.
- Proses verifikasi yang kurang maksimal sehingga turut menyumbang adanya tunggakan di kelompok/anggota.
- Tidak adanya Kartu Angsuran Kelompok di UPK sebagai Back UP pinjaman. Hal tersebut terjadi jika kelompok yang sudah melunasi pinjamannya maka seluruh bukti setoran (kartu angsuran dan kwitansi) diminta kembali oleh bendahara UPK sebagai dasar pemberian IPTW.
- Adanya pemungutan jasa pinjaman 05% kepada kelompok oleh Bendahara dan sekretaris UPK yang penggunaannya untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan

Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue yang mana sepengetahuan penulis belum ada menyoroti hal yang sama khususnya di Kabupaten Simeulue, Atas pemikiran tersebut penulis yakin bahwa kajian ini sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah. Maka pada kesempatan ini, isu tema sentral penelitian akan dituangkan dalam tesis dengan judul: **"Pengaruh Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Penyaluran Dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue"**.

B. Rumusan Masalah

Selanjutnya, berdasarkan pernyataan masalah diatas, studi ini difokuskan dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yaitu adakah Pengaruh Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Penyaluran Dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, menganalisis dan mengungkap besarnya pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berguna oleh berbagai pihak yang terkait antara lain:

1. Kegunaan dalam pengembangan ilmu, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya fungsi pengawasan dan akuntabilitas penyaluran Dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.
 - b. Sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya berkenaan dengan pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Kegunaan dalam praktek, meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan untuk mewujudkan akuntabilitas penyaluran Dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.
 - b. Selanjutnya sangat penting bagi penulis sendiri, sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas Penyaluran Dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

Konsep-konsep atau teori-teori yang menjadi landasan pemikiran penelitian akan dilihat pada penelitian terdahulu berikut, beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud disini adalah penelitian yang ada relevansinya dengan rencana penelitian. Bambang Pamungkas (2012) dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor melakukan penelitian jurnal ilmiah dengan judul; Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah. Penelitian yang dilakukan merupakan tipe penelitian kasualitas, dalam penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban mengenai hubungan antara variabel yang dipilih. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan penyebaran kuesioner penelitian yang menggunakan skala Likert. Dalam menghasilkan pola penegakan akuntabilitas kinerja yang baik bagi instansi pemerintah pada tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota yang ditunjukkan oleh kualitas laporan keuangan pemerintah sebagai faktor yang relatif dominan dalam menegakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena akuntabilitas kinerja yang baik relatif sulit untuk ditegakkan tanpa dukungan dari kualitas laporan keuangan pemerintah penerapan akuntansi publik dan peran pengawasan dari pusat.

Penelitian yang dilakukan Indah Wulandari (2013) dengan judul artikel Pengaruh Pengawasan dalam Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan fungsional dalam menunjang akuntabilitas publik pada pemerintah kota, jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kasuatif, populasi dalam penelitian ini adalah SKPD kota Padang, teknik pengumpulan data dengan teknik survey dengan menyebarkan kuesioner kepada masing-masing kepala SKPD dan seluruh Kepala bagian SKPD. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik, saran dari penelitian ini adalah ditujukan kepada aparat pengawasan fungsional agar dapat terus menjalankan perannya dengan baik dan optimal.

Akhmad Danny Salthori (2011) dalam penelitiannya tentang pengaruh pengawasan dengan judul tesis; Pengaruh Pengawasan Pemerintah Terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Pedesaan (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/kelurahan di Kecamatan Mangggala Kabupaten Tulang Bawang). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi, karena dalam penelitian ini menggunakan dua variabel. Metode eksplanasi adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan dua variabel yang diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang kemudian menjelaskan hubungan kedua variabel tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh pengawasan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan terhadap

pelaksanaan Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Maandiri Pedesaan di Kecamatan Manggala Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis regresi linier sederhana antara variabel bebas (pengawasan pemerintah) dengan variabel terikat (pelaksanaan PNPM-Mandiri Pedesaan), menunjukkan adanya pengaruh signifikan.

1. Teori dan konsep pengawasan

Sebagaimana dikemukakan BAPPENAS (2007:47) mengatakan bahwa sistem pengawasan adalah salah satu bagian dari penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dimana ciri-ciri pemerintahan yang baik adalah *Good Governance* menurut PP No. 101 tahun 2000 yaitu; profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Jika kesembilan dimensi itu dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah maka dikatakan pemerintahan itu *good*. Secara konseptual pengertian *good* (baik) dalam istilah *good governance* (pemerintahan yang baik), mengandung dua pemahaman: (1) nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; (2) aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dimaksud. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah meliputi:

- a. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Adanya tuntutan pengawasan dilakukan dalam manajemen pemerintahan telah dicanangkan terhadap manajemen sektor publik pada pertengahan 1980-an yang diarahkan pada penciptaan manajemen publik yang handal dan mempertajam serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi publik. Konsep dan sistem administrasi publik yang kaku, struktural/hirarkis, dan birokratis telah ditinggalkan dan sebagai gantinya telah dikembangkan suatu konsep manajemen publik yang fleksibel dan berorientasi kepada pasar (Hughes, 1998:12).

Dalam paradigma baru, birokrasi pemerintah dibuat seefisien dan seefektif mungkin sehingga mereka dapat bergerak fleksibel dalam mengikuti tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan. Paradigma baru ini dianggap sebagai solusi atas berbagai label negatif yang melekat pada sektor publik sehingga dalam perkembangannya pendekatan tradisional dalam administrasi publik telah ditinggalkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, dan sebagai gantinya terjadi adopsi besar-besaran *new public management (NPM)*.

Perubahan ini bukan perubahan sederhana dalam "*management style*" dalam administrasi publik, tapi perubahan ini merupakan perubahan peranan pemerintah dalam masyarakat/*society* dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya/*citizenry*. Paradigma baru ini merupakan tantangan langsung atas berbagai fungsi/prinsip administrasi publik yang telah diyakini sebagai paradigma terpenting selama hampir 20 abad. Dalam paradigma baru, birokrat dan

pemerintah bukanlah satu-satunya *provider* barang dan jasa masyarakat. Perspektif ini menempatkan organisasi swasta sebagai mitra pemerintah untuk menyediakan berbagai kebutuhan publik. Daripada terlibat langsung dalam menyediakan berbagai barang dan jasa, pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakatnya melalui subsidi, pengaturan perundangan dan kontrak. Karena mekanisme akuntabilitas akan berjalan dengan baik jika birokrat dipisahkan dari masyarakat (Hughes 1998:2). Keterbukaan pemerintah juga ditekankan dalam paradigma baru ini, hal ini ditunjukkan dengan diadopsinya berbagai prinsip dan sistem manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik untuk memperbaiki kinerja birokrasi.

Dari pengertian di atas dapat ditarik makna lain bahwa *good governance* merupakan seni atau gaya moral pemerintahan yang baik, lebih memerlukan suatu butir-butir moral-legal dalam pelaksanaannya. *Good governance* menunjuk pada suatu penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif diantara institusi negara/pemerintah (*state*), sektor swasta/dunia usaha (*private sector*) dan masyarakat (*society*). Dengan demikian, paradigma *good governance* menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara domain negara, sektor swasta/dunia usaha dan masyarakat. Ketiganya berada pada posisi yang sederajat dan saling kontrol untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh satu domain terhadap domain lainnya. Sedangkan *clean government* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang bersih, yaitu bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta permasalahan-permasalahan yang lain terkait dengan pemerintahan. Mendahulukan *clean* (bersih) adalah lebih baik daripada *good*, dengan alasan, untuk menciptakan

pemerintahan yang baik dalam diri birokrat harus ada komitmen bersih (*clean*) terlebih dahulu, apabila tidak maka percuma saja. Jadi syarat menjadi *Good Governance* adalah harus *Clean Government* terlebih dahulu. Agar pemerintahan itu *good* tentu mengharuskan atau dibutuhkan adanya pengawasan.

Pentingnya pengawasan dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) telah diatur dalam Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa pimpinan penyelenggara pelayanan publik wajib secara berkala mengadakan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan di lingkungan secara berkelanjutan dan hasilnya secara berkala dilaporkan kepada pimpinan tertinggi penyelenggara pelayanan publik. Kemudian pemerintah menggulirkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang OMBUSMAN Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik. Lembaga ini bertujuan untuk mengawasi atau mencegah penyimpangan pelayanan publik (*mal administrasi*) oleh penyelenggara negara pelayanan publik baik instansi negara/pemerintah BUMN, BUMD BHMN termasuk swasta maupun perseorangan yang memberikan pelayanan publik tertentu yang didanai oleh APBN/APBD.

Dengan demikian jika ditarik kesimpulan berdasarkan penjelasan di atas maka tampak bahwa pengawasan itu sangat penting dilaksanakan sekaligus sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen pemerintahan untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut, maka untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan organisasi.

Jika ditelusuri definisi pengawasan sebagaimana dikemukakan George R. Terry (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Robbin dalam Syafiie, Inu Kencana. (1999: 150) menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Stoner, James.A.F. Freeman, Edward R., Gilbert JR. Daniel R. (1996: 341) menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.

Setelah membahas definisi pengawasan sebagai acuan dari para ahli di atas maka ditarik kesimpulan pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. Atau pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

2. Tipe-tipe pengawasan

Menurut Sondang P Siagian (2000:321) mengatakan tipe pengawasan yang dapat dilakukan adalah (1) pengawasan langsung (2) pengawasan tidak langsung.

Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah yang dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya. Sedangkan pengawasan tidak langsung pengawasan jarak jauh dengan melalui laporan oleh bawahan baik secara lisan maupun tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang dicapai. Selanjutnya, Winardi (2000: 589) mengatakan agar pengawasan berjalan dengan baik ada 3 (tiga) pengawasan yang dapat dilakukan yaitu (a) Pengawasan Pendahuluan (*preliminary control*), (b) Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*) (c) Pengawasan Feed Back (*feed back control*).

Berdasarkan dimensi pengawasan di atas maka yang dipakai si peneliti dalam penulisan tesis ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Winardi (2000: 589). Pertimbangan menggunakan teori ini karena ada kesesuaian atau kecocokan dengan fenomena yang terjadi di lapangan khususnya di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue tentang pengawasan penyaluran dana PNPM. Dimana tujuan pelaksanaan PNPM di Kecamatan Simeulue Tengah adalah mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan daerah perdesaan, memperbaiki pengelolaan pemerintahan (*local governance*) dan penguatan institusi di perdesaan Indonesia. Kesemuanya ini diharapkan bisa dilakukan melalui, peningkatan pelayanan dasar dalam bidang infrastruktur sosial dan ekonomi di wilayah perdesaan dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pengembangan sosial ekonomi di wilayahnya di Kecamatan Simeulue Tengah.

Lebih jelasnya pengawasan yang dikemukakan Winardi (2000: 589) akan dijelaskan:

a. Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*).

Prosedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Dipandang dari sudut prespektif demikian, maka kebijaksanaan-kebijaksanaan merupakan pedoman-pedoman untuk tindakan masa mendatang. Tetapi, walaupun demikian penting untuk membedakan tindakan menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan mengimplementasikannya. Merumuskan kebijakan-kebijakan termasuk dalam fungsi perencanaan sedangkan tindakan mengimplementasi kebijaksanaan merupakan bagian dari fungsi pengawasan.

Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*) biasanya memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Para pegawai atau karyawan perlu memiliki kemampuan, baik kemampuan fisik ataupun kemampuan intelektual untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Bahan-bahan yang akan digunakan harus memenuhi kualitas tertentu dan mereka harus tersedia pada waktu dan tempat yang tepat. Di samping itu, modal harus pula tersedia agar dapat dicapai suplai peralatan serta mesin-mesin yang diperlukan. Akhirnya sumber-sumber daya finansial harus pula tersedia dalam jumlah dan waktu yang tepat. Pengawasan pendahuluan meliputi (1) Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia. (2)

Pengawasan pendahuluan bahan-bahan. (3) Pengawasan pendahuluan modal (4) Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya finansial. Dengan demikian indikator pengawasan ini mencakup (1) Kejelasan target (2) Kejelasan standar kegiatan (3) Kejelasan standar waktu penyelesaian target (4) Kesesuaian metode pengukuran (5) Kepatuhan terhadap peraturan.

b. Pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control*)

Concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung (*concurrent control*). Memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Alat prinsip dengan apa pengawasan dapat dilaksanakan adalah aktivitas para manajer yang memberikan pengarahan atau yang melaksanakan supervis Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk: (1) Mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode-metode serta prosedur-prsedur yang tepat. (2) Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Proses memberikan pengarahan bukan saja meliputi cara dengan apa petunjuk-petunjuk dikomunikasikan tetapi ia meliputi juga sikap orang-orang yang memberikan penyerahan. Dengan demikian indikator pengawasan ini mencakup: (1) Intensitas pengukuran (2) Bentuk pengukuran (3) Keterlibatan pengukuran. (4) Penyimpangan yang terjadi (5) Capaian target yang diinginkan (6) Sanksi bila target tidak tercapai.

c. Pengawasan feed back (*feed back control*)

Sifat khas dari metode-metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk

mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Pengawasan feedback (*feedback control*). Memusatkan perhatian pada hasil-hasil akhir. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi-operasi aktual. Tipe pengawasan ini mencapai namanya dari fakta bahwa hasil-hasil historikal mempengaruhi tindakan-tindakan masa mendatang.

Adapun metode pengawasan *feed back* menurut Schermerhorn, Jhon R. (2003: 431) terdiri dari (1) Analisis laporan keuangan (*Financial Statement Analysis*). (2) Analisis biaya standar (*Standard Cost Analysis*). (3) Pengawasan kualitas (*Quality Control*) (4) evaluasi hasil pekerjaan Pekerja (*Employee Performance Evaluation*). Dengan demikian indikator pengawasan ini mencakup (1) Upaya perbaikan target (hasil) (2) Upaya pelaksanaan pengukuran (3) Penjatuhan hukuman bagi pegawai yang menyimpang. Jika mencermati uraian di atas maka pengawasan itu dapat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Konsep Pengawasan
Sumber: Winardi (2000:324)

3. Konsep akuntabilitas

Akuntabilitas adalah satu ciri-ciri pemerintahan yang baik atau *good governance* sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 101 tahun 2000. Istilah

akuntabilitas populer dikalangan lembaga keuangan internasional seperti UNDP memberikan penekanan khusus pada pembangunan manusia yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan transformasi administrasi publik (UNDP Report, 1997). Sementaraitu, Bank Dunia lebih memberikan perhatian pada pendayagunaan sumber daya sosial dan ekonomi bagi pembangunan. Sedangkan *Organization for Economic Cooperation dan Development* (OECD) menekankan pada penghargaan hak-hak asasi manusia, demokrasi dan legitimasi pemerintah.

Secara konseptual, *good governance* oleh UNDP dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara. Merujuk pada konsepsi tersebut, *good governance* memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Di atas semua itu, atribut utama *Good Governance* adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian berbagai persoalan publik. Dalam konteks itu, mekanisme kontrol (*check and balance*) perlu ditegakkan sehingga tidak ada satu komponen pun yang memegang kekuasaan absolut. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menegakkan akuntabilitas sistem, struktur, organisasi dan staf atas apa yang menjadi tanggung jawab, fungsi, tugasnya yang antara lain terlihat dari perilaku atau budaya kerjanya.

Jika dicermati istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawabannya. Tentu agar akuntabel maka

seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan lembaga harus berfungsi sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Prinsip *good governance* menuntut pertanggung jawaban dari para penyelenggara pemerintahan dibidang pelayanan publik maupun bidang lainnya seperti bidang politik. Ukuran keberhasilan harus ditetapkan untuk bahan perbandingan apakah kinerja yang bersangkutan layak disebut baik atau memenuhi persyaratan pertanggungjawaban yang baik dari segi ekonomis maupun keuangan. Prinsip akuntabilitas apabila dilaksanakan dengan baik akan mencegah terjadinya korupsi serta menjamin bahwa kinerja organisasi telah sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Dalam administrasi publik akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan

pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. Atau akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya secara transparan kepada masyarakat.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Buku Modul 1 Pengembangan Good Governance Dan Akuntabilitas Sektor Publik yang diterbitkan Depdagri dan LAN (2004: 23) mengatakan akuntabilitas mencakup tentang mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi harus ditampilkan secara transparan kepada *stakeholder*. Hal ini digunakan untuk menilai apakah kehematan (ekonomis), efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana publik terhadap jasa atau produk prima yang dihasilkan (*excellency*) telah dilakukan dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali (*equity*).

Kemudian menurut Lembaga Administrasi Negara pada Modul 1 buku di atas (2004:11) dipertegas lagi pengertian akuntabilitas adalah konsep tentang kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diterima kepada orang yang memberikan mandat tersebut. Konsep akuntabilitas adalah sebuah konsep yang dinamis, dimana berbagai model akuntabilitas selalu berkembang untuk menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan dan perubahan lingkungan.

Kebijakan yang mengatur akuntabilitas dimulai sejak dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dalam UU No. 28/1999 disebutkan bahwa azas penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik meliputi: (1) Azas Kepastian Hukum. (2) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara. (3) Azas Kepentingan Umum. (4) Azas Keterbukaan. (5) Azas Proporsionalitas. (6) Azas Profesionalitas. (7) Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas disini diartikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam tataran praktis Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud nyata penerapan akuntabilitas di Indonesia. Inpres ini mendefinisikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam konteks AKIP ini, instansi pemerintah diharapkan dapat menyediakan informasi kinerja yang dapat dipahami dan digunakan sebagai alat ukur keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

4. Beberapa metode untuk menegakkan akuntabilitas.

Mardiasmo (2004: 1410) mengatakan ada beberapa metode menegakkan akuntabilitas yaitu:

- a. Kontrol Legislatif yaitu penegakan akuntabilitas oleh legislative dengan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan melalui diskusi dan sejumlah komisi di dalamnya. Jika komisi-komisi legislatif dapat berfungsi

secara efektif, maka mereka dapat meningkatkan kualitas pembuatan keputusan (meningkatkan responsivitasnya terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat), mengawasi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah melalui investigasi, dan menegakkan kinerja.

- b. Akuntabilitas Legal: Ini merupakan karakter dominan dari suatu negara hukum. Pemerintah dituntut untuk menghormati aturan hukum, yang didasarkan pada badan peradilan yang independen. Aturan hukum yang dibuat berdasarkan landasan ini biasanya memiliki sistem peradilan, dan semua pejabat publik dapat dituntut pertanggung jawabannya di depan pengadilan atas semua tindakannya. Peran lembaga peradilan dalam menegakkan akuntabilitas berbeda secara signifikan antara negara, antara negara yang memiliki sistem peradilan administratif khusus seperti perancis, hingga negara yang memiliki tatanan hukum di mana semua persoalan hukum diselesaikan oleh badan peradilan yang sama, termasuk yang berkaitan dengan pernyataan tidak puas masyarakat terhadap pejabat publik. Dua faktor utama yang menyebabkan efektivitas akuntabilitas legal adalah kualitas institusi hukum dan tingkat akses masyarakat atas lembaga peradilan, khususnya yang berhubungan dengan biaya pengaduan. Institusi hukum yang lemah dan biaya yang mahal (tanpa suatu sistem pelayanan hukum yang gratis) akan menghambat efektivitas akuntabilitas legal.
- c. Ombudsman: Dewan ombudsmen, baik yang dibentuk di dalam suatu konstitusi maupun legislasi, berfungsi sebagai pembela hak-hak masyarakat. Ombudsmen mengakomodasi keluhan masyarakat, melakukan investigasi, dan menyusun rekomendasi tentang bagaimana keluhan tersebut diatasi

tanpa membebani masyarakat. Sejak diperkenalkan pertama kali di Swedia pada abad 19, Ombudsmen telah menyebar ke berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Secara umum, masyarakat dapat mengajukan keluhannya secara langsung kepada lembaga ini, baik melalui surat maupun telepon. Di beberapa negara, misalnya Inggris, Ombudsmen dilihat sebagai perluasan kontrol parlemen terhadap eksekutif dan keluhan masyarakat disalurkan melalui anggota parlemen. Pada hampir semua kasus, Ombudsmen melakukan tugas investigatifnya tanpa memungut biaya dari masyarakat.

- d. **Desentralisasi dan Partisipasi:** Akuntabilitas dalam pelayanan publik juga dapat ditegakkan melalui struktur pemerintah yang terdesentralisasi dan partisipasi. Terdapat beberapa situasi khusus di mana berbagai tugas pemerintah didelegasikan ke tingkat lokal yang dijalankan oleh para birokrat lokal yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat lokal. Legitimasi elektoral juga menjadi faktor penting seperti dalam kasus pemerintah pusat. Tetapi cakupan akuntabilitas di dalam sebuah sistem yang terdesentralisasi lebih merupakan fungsi otonomi di tingkat lokal. Itupun sangat bervariasi secara signifikan sesuai derajat otonomi yang diperoleh, dari otonomi yang sangat luas seperti di AS hingga otonomi terbatas yang umum dijumpai di negara-negara berkembang. Ketergantungan yang tinggi terhadap NGOs dan berbagai organisasi dan koperasi berbasis masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik menjadi salah satu perkembangan yang menjanjikan bagi terwujudnya manajemen publik yang terdesentralisasi dan bertanggung jawab.

- e. Kontrol Administratif Internal yaitu pejabat publik yang diangkat sering memainkan peran dominan dalam menjalankan tugas pemerintahan karena relatif permanennya masa jabatan serta keterampilan teknis. Biasanya, kepala-kepala unit pemerintahan setingkat menteri diharapkan dapat mempertahankan kontrol hirarkis terhadap para pejabatnya dengan dukungan aturan dan regulasi administratif dan finansial dan sistem inspeksi. Untuk negara-negara dengan struktur administratif yang lemah, terutama di negara-negara berkembang dan beberapa negara komunis, metode kontrol tersebut memiliki dampak yang terbatas. Masalah ini disebabkan karena hubungan yang kurang jelas antara kepemimpinan politik yang bersifat temporer dan pejabat publik yang diangkat secara permanen. Jika mereka melakukan persekongkolan, akuntabilitas tidak bisa diwujudkan (hal ini juga terjadi sejak lama di negara-negara maju) dan jika mereka terlibat dalam konflik, maka yang menjadi korban adalah kepentingan publik.
- f. Media massa dan opini publik adanya dukungan media massa serta opini publik. Tantangannya, misalnya, adalah bagaimana dan sejauhmana masyarakat mampu mendayagunakan media massa untuk memberitakan penyalahgunaan kekuasaan dan menghukum para pelakunya. Terdapat 3 faktor yang menentukan dampak aktual dari media massa dan opini publik. *Pertama*, kebebasan berekspresi dan berserikat harus diterima dan dihormati. Di banyak negara, kebebasan tersebut dilindungi dalam konstitusi. Derajat penerimaan dan rasa hormat umumnya dapat diukur dari peran media massa (termasuk perhatian terhadap pola kepemilikan) dan

pentingnya peran kelompok kepentingan, asosiasi dagang, organisasi wanita, lembaga konsumen, koperasi, dan asosiasi profesional. *Kedua*, pelaksanaan berbagai tugas pemerintah harus transparan. Kuncinya adalah adanya akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini harus dijamin melalui konstitusi (misalnya, UU Kebebasan Informasi) dengan hanya mempertimbangkan pertimbangan keamanan nasional (dalam pengertian sempit) dan privasi setiap individu. Informasi yang dihasilkan pemerintah yang seharusnya dapat diakses secara luas antara lain meliputi anggaran, akuntansi publik, dan laporan audit. Tanpa akses terhadap berbagai informasi tersebut, masyarakat tidak akan sepenuhnya menyadari apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah dan efektivitas media massa akan sedikit dibatasi. *Ketiga*, adanya pendidikan sipil yang diberikan kepada warga negara, pemahaman mereka akan hak dan kewajibannya, di samping kesiapan untuk menjalankannya

5. Dimensi-dimensi akuntabilitas.

Menurut Djoko Susilo, (2005:331) dalam bukunya, *Good Governance Melalui Implementasi SAKIP*, (2005:331) mengatakan agar akuntabilitas dapat berjalan dengan baik ada tiga dimensi akuntabilitas, yaitu (1) Akuntabilitas politik. (2) Akuntabilitas keuangan dan (3) Akuntabilitas administratif. Menurut LAN RI dan BPKP (2001: 29) menjelaskan dimensi akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas keuangan, manfaat, dan prosedural. Berdasarkan kajian teori di atas maka landasan teori yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah teori yang dikemukakan Djoko Susilo, (2005:331) dalam bukunya, *Good Governance Melalui Implementasi SAKIP*, (2005:331).

Pertimbangan memakai teori ini karena ada kecocokan dengan fenomena dilapangan, hal ini terungkap dari hasil laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah di Aceh yang diterbitkan oleh Bank Dunia tahun 2009. Dalam laporan itu khususnya mengenai akuntabilitas pemerintah daerah kabupaten Simeulue masih memiliki capaian sebesar 56% dari 9 indikator yang diteliti yaitu menyangkut pengawasan dan audit keuangan. Artinya perlu dilakukan pertanggungjawaban yang akuntabel dari sudut keuangan. Ketiga dimensi akuntabilitas ini akan diuraikan lebih lanjut.

a. Akuntabilitas politik.

Akuntabilitas ini biasanya dihubungkan dengan proses dan mandat pemilu, yaitu mandat yang diberikan masyarakat kepada para politisi yang menduduki posisi legislatif dan eksekutif dalam suatu pemerintahan. Masa jabatan kedua kekuasaan tersebut bersifat temporer karena mandat pemilu sangat tergantung pada hasil pemilu yang dilakukan pada interval waktu tertentu. Untuk negara-negara di mana mandat pemilu mendapat legitimasi penuh (pemilu bersifat bebas dan hasilnya diterima oleh semua pihak), masyarakat menggunakan hak suaranya untuk mempertahankan para politisi yang mampu menunjukkan kinerja yang baik serta menjatuhkan pemerintahan yang berunjuk prestasi buruk. Mandat elektoral yang kuat memberikan legitimasi kepada pemerintah dan membantu menjamin kredibilitasnya, di samping stabilitas dan prediktibilitas kebijakan yang diformulasikannya. Indikator dimensi ini mencakup (1) standardisasi (2) Prosedural (3) publikasi laporan ke publik (4) audit akuntan publik (5) Kontrol dari masyarakat.

b. Akuntabilitas financial.

Akuntabilitas finansial, fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Masalah pokoknya adalah ketepatan waktu dalam menyiapkan laporan, proses audit, serta kualitas audit. Perhatian khusus diberikan pada kinerja dan nilai uang serta penegakan sanksi untuk mengantisipasi dan mengatasi penyalahgunaan, mismanajemen, atau korupsi.

Jika terdapat bantuan finansial eksternal, misalnya dari pinjaman lembaga keuangan multilateral atau melalui bantuan pembangunan oleh lembaga donor, maka standar akuntansi dan audit dari berbagai lembaga yang berwenang harus diperhatikan. Hal inilah yang kiranya dapat menjelaskan besarnya perhatian pada standar akuntansi dan audit internasional dalam menegakkan akuntabilitas finansial. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan dana. Hasil tersebut juga dapat digunakan oleh masyarakat umum dan *stakeholders* (seperti donor) untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Tuntutan agar instansi pemerintah terutama bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk dapat mengukur kinerja organisasinya sendiri semakin besar dengandikeluarkannya PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Ke dua PP tersebut secara

eksplisit menuntut agar pertanggungjawaban Kepala Daerah tidak lagi hanya berfokus kepada pertanggungjawaban keuangan (*input oriented*). Kepala Daerah sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan di daerah diminta pula untuk dapat mempertanggungjawabkan hasil atau efektifitas kebijakan-kebijakan dan program-program yang dilaksanakannya. Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota diminta untuk menjelaskan apakah dana-dana masyarakat telah dibelanjakan secara lebih ekonomis, efisien dan efektif pada sektor-sektor yang merupakan prioritas utama yang dibutuhkan masyarakat.

Hal ini juga masih menjadi komitmen dalam berbagai PP yang diterbitkan Pemerintah seiring dengan pelaksanaan UU No 32 Tahun 2004, bahwa tuntutan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja berdasarkan hasil atau manfaat kepada masyarakat menjadi keharusan bagi Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota. Berbagai peraturan mewajibkan daerah untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Adapun indikator pada dimensi ini adalah (1) ketaatan petugas kepada peraturan, (2) integritas (3) pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan, (4) mengikuti prinsip-prinsip keuangan, (5) membuat laporan keuangan.

c. Akuntabilitas administratif.

Akuntabilitas administratif, merujuk pada kewajiban untuk menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam kerangka kerja otoritas dan sumber daya yang tersedia. Dalam konsepsi yang demikian, akuntabilitas administratif umumnya berkaitan dengan pelayan publik, khususnya para direktur, kepala departemen, dinas, atau instansi, serta para manajer perusahaan milik negara.

Mereka adalah pejabat publik yang tidak dipilih melalui pemilu tetapi ditunjuk berdasarkan kompetensi teknis. Kepada mereka dipercayakan sejumlah sumber daya yang diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu.

Secara umum, spektrum yang begitu luas telah menyebabkan konsep akuntabilitas secara fleksibel. Yang paling mudah adalah mengidentikkan akuntabilitas pelayan publik dengan bentuk pertanggung jawaban mereka kepada atasannya, baik secara politik maupun administratif.

Russel, E. W, (2005:89) disebutnyaada juga akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai komando tertentu.

Russel, E. W, (2005:89) mengatakan ada elemen utama akuntabilitas, yaitu:

- 1) Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku para birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing).

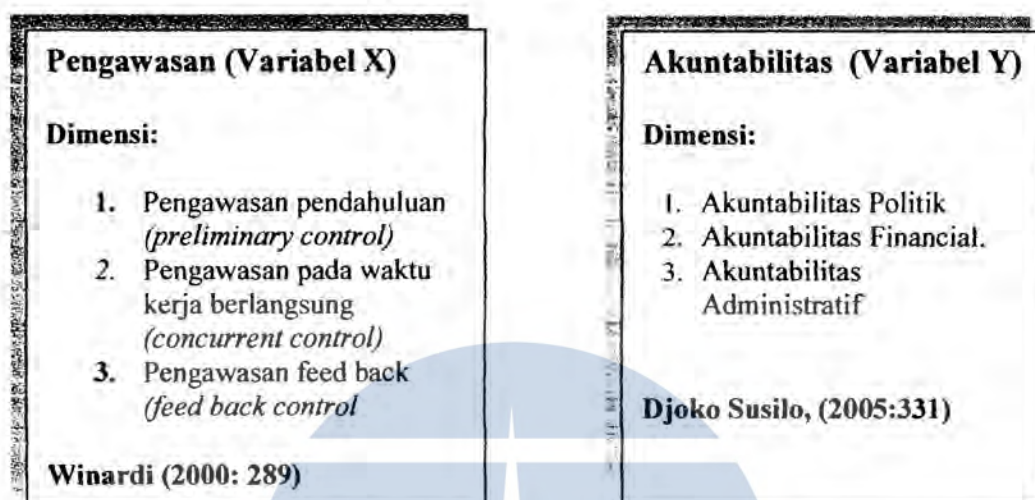
- 2) Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (*new public management*). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru.
- 3) Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan ulang itu seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya. Dengan demikian indikator dimensi ini mencakup (1) Prosedural (2) Moralitas (3) Etika (4) Kepastian hukum (5) Memiliki Nilai (6) Azas Kepatutan.

B. Kerangka Berpikir

Rujukan teori pengawasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan menurut Winardi (2000: 259) yang mengatakan kesuksesan pengawasan terdiri dari pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan feed back (*feed back contro*). Sedangkan rujukan teori akuntabilitas teori Djoko Susilo, (2005:331) yang mengatakan ada tiga dimensi akuntabilitas yaitu (1) akuntabilitas politik, (2) akuntabilitas financial. (3) akuntabilitas administratif. Dengan

demikian maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 2.2: Kerangka Pemikiran Penelitian



C. Hipotesis

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap fenomena, rumusan masalah, konsep teori dan pemikiran penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis umum sebagai berikut “terdapat pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas Penyaluran Dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue. Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis penelitian ini akan dirinci sesuai dengan teori yang digunakan yaitu:

1. Terdapat pengaruh pengawasan pendahuluan terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu.
2. Terdapat pengaruh pengawasan pada waktu kerja berlangsung terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.

3. Terdapat pengaruh pengawasan *feed back* terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini membahas Pengaruh Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Penyaluran Dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue, dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam membahas fenomena yang terjadi dalam proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Simeulue dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif tentang ucapan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi masyarakat sebagai sasaran program ini. Untuk mendeskripsikan proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri digunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memusatkan perhatian pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena realitas sosial masyarakat. Penggunaan pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pendekatan ini relevan dan cocok dengan masalah penelitian melalui interpretasi proses dan makna pada implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin seperti halnya PNPM Mandiri Kabupaten.

B. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini ditetapkan secara purposif, yaitu mereka yang mempunyai kompetensi dalam kaitannya dengan proses implementasi Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kabupaten Simeulue. Penetapan informan ini didasarkan kepada penilaian peneliti untuk tujuan tertentu atau situasi tertentu. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok pelaksana program (*implementor*) dan kelompok sasaran program (*target group*). Karena penelitian ini kualitatif, maka informasi yang didapat dari dua sumber yang berbeda harus dilakukan triangulasi antara data yang diperoleh dari kedua sumber yang berbeda tersebut. Data yang diperoleh dari dua sumber selanjutnya digunakan untuk menganalisis proses implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Simeulue dan faktor-faktor yang menyebabkan implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Simeulue kurang berhasil dalam mencapai tujuan.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik kesesuaian dengan data yang diperlukan dan bukan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan, tetapi berdasarkan pertimbangan fungsi dan peran informan sesuai dengan masalah penelitian. Karakteristik informannya adalah mereka yang terlibat langsung dalam proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kabupaten Simeulue dengan kriteria sebagai berikut:

1. Aparat pelaksana di tingkat Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue yang terlibat langsung dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan.
2. Kelompok masyarakat di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue yang pernah terlibat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan selama 2 tahun.

3. Masyarakat Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue yang menjadi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan pada tahun 2010.

C. Definisi Konsep dan Operasional.

Berikut ini akan didefinisikan konsep pengawasan dan akuntabilitas tujuannya untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian (Arikunto, 1998:112). Adapun definisi konsep pengawasan adalah memantau pekerjaan pegawai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan lembaga penyalur dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue. Sedangkan akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban penyaluran dana secara akuntabel yang harus dijaga agar penyaluran dana PNPM Mandiri tepat sasaran. Sedangkan definisi operasional pengawasan adalah penerapan pengawasan itu dimana pegawai bekerja agar sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan dengan menerapkan indikator dari pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan feed back (*feed back control*). Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang diukur dari indikator (1) akuntabilitas politik, (2) akuntabilitas financial. (3) akuntabilitas administrative.

1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dirumuskannya operasionalisasi variabel dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan mengenai kandungan variabel yang digunakan, dimensi (sisi) dan

yang digunakan. Uraian dalam operasionalisasi variabel berfokus kepada kinerja pegawai, kualitas pelayanan dan kompetensi. Namun perlu dijelaskan ada perbedaan tabel operasionalisasi variabel di bawah ini, tentu saja tidak terlepas dari pencetus teori itu sendiri sebagaimana disajikan pada landasan teori di uraian Bab II.

Lebih jelasnya operasionalisasi variabel penelitian ini dapat disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.1.3
Operasionalisasi Variabel Pengawasan, Akuntabilitas dan Indikator

Variabel	Dimensi	Indikator
Pengawasan Winardi, (2000: 289)	Pengawasan pendahuluan (<i>preliminary control</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia. 2. Pengawasan pendahuluan bahan-bahan. 3. Pengawasan pendahuluan modal. 4. Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya finansial.
	Pengawasan pada waktu kerja berlangsung (<i>concurrent control</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode-metode serta prosedur-prsedur yang tepat. 2. Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
	Pengawasan feed back (<i>feed back control</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis laporan keuangan (<i>Financial Statement Analysis</i>). 2. Analisis biaya standar (<i>Standard Cost Analysis</i>). 3. Pengawasan kualitas (<i>Quality Control</i>). 4. evaluasi hasil pekerjaan Pekerja (<i>Employee Performance Evaluation</i>).
Akuntabilitas Djoko Susilo, (2005:331)	Akuntabilitas politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standardisasi. 2. Prosedural. 3. Publikasi laporan kepublik. 4. Audit akuntan publik. 5. Kontrol dari masyarakat
	Akuntabilitas financial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketaatan pctugas kepada peraturan, 2. Integritas 3. Pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan, 4. Mengikuti prinsip-prinsip keuangan. 5. Membuat laporan keuangan
	Akuntabilitas administratif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedural 2. Moralitas 3. Etika 4. Kepastian hukum. 5. Memiliki Nilai 6. Azas Kepatutan

Sumber: Modifikasi peneliti 2014

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang terlibat langsung dalam Kecamatan Simeulue Tengah yang tersebar di 16 Desa yaitu Kampung Aie, Wel-Wel Lamayang, Latitik, Laure'e, Lakubang, Lambaya, Lauke, Dihit, Sebbe, Wellangkum, SuakBaru, Luan Sorip, Putra Jaya, Situfa jaya, Kuta Baru. Sehingga responden dalam penelitian ini sebanyak 2.956 KK. Sedangkan jumlah sampel responden 97 KK, dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Jumlah Kepala Keluarga di Setiap Desa dan Sampel Secara Personal dalam Kecamatan

No	Desa	Jumlah KK	Sampel KK
1	Kampung Aie,	458	15
2	Wel wel	172	6
3	Lamayang	237	8
4	Latitik	171	6
5	Laure'e	153	5
6	Lakubang	186	6
7	Lambaya,	156	5
8	Lauke,	143	4
9	Dihit	154	5
10	Sebbe	164	5
11	Wellangkum	187	6
12	Suak Baru	185	7
13	Luan Sorip	146	5
14	Putra jaya	120	4
15	Situfa jaya	144	5
16	Kuta Baru	180	6
	Jumlah	2.956 KK	97

Sumber: Kecamatan Simeulue Tengah 2014

Berdasarkan sampel itu maka dilakukan teknik penarikan sampel dengan menggunakan rumus T Tharo Yamane, dimana tingkat t presisi yang dipakai apakah $\alpha = 0.05$, artinya, tingkat kebenaran penelitian ini 90% atau kesalahan sebesar 10%. Adapun rumus penetapan sampel dimaksud adalah:

$$n = \frac{Z^2}{Z^2 D + 1}$$

Keterangan:

N = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

D = level signifikansi yang diinginkan yaitu 0,10

Sehingga sampel yang diambil adalah
2956

$$n = \frac{2956}{2956 (0.10)^2 + 1}$$

$$n = 2956/30.56 = 96.72 = 97 \text{ orang}$$

Jumlah sampel di atas kemudian dialokasikan secara proporsional dengan menggunakan rumus secara acak proporsional atau *proportional sampling*, dengan rumus sebagai berikut yaitu :

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Dimana:

N_i : Besar sampel untuk stratum i

N_i : Total sub populasi dari stratum i

N : Total Populasi

N : Besarnya sampel

Untuk menentukan siapa saja yang menjadi unit analisis maka peneliti membuat undian dengan cara mencatat semua daftar nama disetiap kepala keluarga yang ada disetiap desa kemudian dimasukkan ke kotak lalu diambil/dicabut satu persatu tanpa pengembalian. Misalnya di desa Kampung Aie ditulis nama sebanyak 458 orang kemudian dikocok dan dicabut sebanyak 15 orang dan itulah yang menjadi sampel penelitian, demikian proses selanjutnya untuk setiap desa.

E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sensus, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk pernyataan-pernyataan secara terstruktur dimana setiap responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja disebabkan keterbatasan waktu peneliti. Kuesioner penelitian tersebut diantar langsung kepada responden oleh peneliti yang ditujukan kepada penerima dana simpan pinjam di perdesaan dalam Kecamatan Simeulue Tengah untuk menjawab kuesioner, responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap setiap pernyataan dengan memilih salah satu dari lima pilihan jawaban yang disediakan. Dalam kuesioner diberi bobot 1 sampai 5 yang menunjukkan interval sangat tidak baik sampai dengan sangat baik.

F. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Karena instrumen telah disediakan jawabannya maka peneliti terlebih dahulu melakukan pengujian kusioner untuk mengetahui apakah kuesioner itu *validitas*, dan *reliabilitas*. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2008:137). Uji validitas menggunakan alat uji statistik dengan rumus korelasi *Pearson Product Moment Correlation* Sugiyono (2008: 138), yaitu:

$$r = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{(n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)(n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2)}}$$

Keterangan :

- R = Koefisien Korelasi Pearson
- X_i = Skor item ke-i
- Y = Skor Total Keseluruhan item

n = Jumlah populasi

Hasil perhitungan korelasi *Pearson Product Moment* tersebut kemudian dibandingkan dengan tabel nilai – nilai r *Product Moment*, selanjutnya diinterpretasikan apabila r hitung $>$ r tabel maka item-item kuesioner tersebut dikatakan *valid*.

Analisis *reliabilitas/konsistensi* adalah pengujian instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2008:137). Pengujian reliabilitas digunakan dengan pengujian *reliabilitas consistency*, atau metode belah dua (ganjil dan genap) dengan menggunakan Spearman Brown dalam Sugiyono, (2008:153) dengan rumus:

$$r_i = \frac{2rb}{1 + rb}$$

Dimana:

r_i = reliabilitas internal seluruh instrumen

rb = korelasi pearson antara belahan pertama dan kedua.

Dengan dilakukannya kedua pengujian tersebut maka diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi *valid* dan *reliabel*. Ini berarti bahwa dengan menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, diharapkan data penelitian menjadi *valid* dan *reliabel*.

G. Metode Analisis

Untuk menguji hipotesis yang ditetapkan peneliti menggunakan analisis regresi ganda dengan formula $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$. Alasan menggunakan regresi ganda ingin memprediksi (meramalkan) apakah semakin

baik penyaluran dana PNPM Mandiri dengan dilakukannya pengawasan dengan mengadopsi teori pengawasan yang diciptakan oleh Winardi.

Sebelum menggunakan uji regresi ganda terlebih dahulu peneliti melakukan uji asumsi klasik. Sebab aturan main menggunakan regresi ganda apabila data yang diperoleh diasumsikan memenuhi normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut ternyata data yang diperoleh setelah diolah memenuhi persyaratan dimaksud. Artinya, alat uji regresi ganda yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi yang diharapkan. Karena itu pengujian hipotesis yang diajukan peneliti dapat menggunakan regresi ganda.

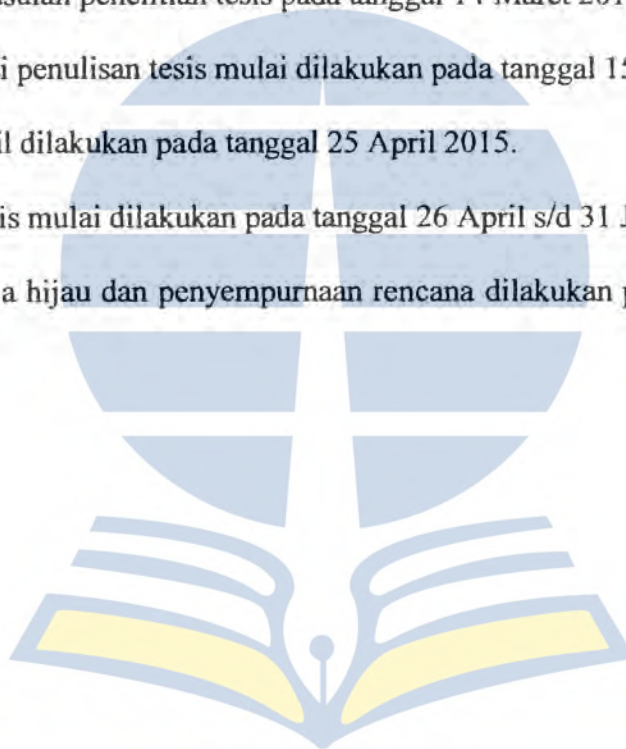
Dalam pengolahan data statistik menggunakan alat bantu komputasi SPSS versi 18.0 for Windows. Kriteria pengujian sebagai berikut: (1). $H_0 : b_i = 0$, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan dari masing-masing sub variabel (X_1, X_2, X_3) terhadap variabel tidak bebas (Y). (2). $H_a : b_i \neq 0$, terdapat hubungan yang positif dan signifikan dari masing-masing variabel (X_1, X_2, X_3) terhadap variabel tidak bebas (Y). Keterangan $i = 1, 2, 3$ (artinya ada tiga hipotesis yang hendak diuji) dengan kriteria pengambilan keputusan penolakan dan penerimaan: (a). Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ (tingkat signifikan), maka H_a diterima dan H_0 ditolak (b). Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ (tingkat signifikan), maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak Nopember 2014 sampai dengan Maret 2015. Penelitian ini diawali dengan penyusunan usulan penelitian dengan

melakukan kegiatan penelitian yang meliputi penelusuran kepustakaan, media cetak/elektronik, baik literatur teoritis, dokumen-dokumen terkait. Lebih jelasnya rincian jadwal penelitian ini sebagai berikut:

1. Persiapan penelitian pendahuluan diantaranya pengajuan usulan penelitian pada tanggal 28 Nopember 2014.
2. Konsultasi penulisan usulan penelitian dilakukan pada tanggal 29 Nopember 2014 s/d 31 Maret 2015.
3. Seminar usulan penelitian tesis pada tanggal 14 Maret 2015.
4. Konsultasi penulisan tesis mulai dilakukan pada tanggal 15 Maret 2015.
5. Ujian hasil dilakukan pada tanggal 25 April 2015.
6. Revisi tesis mulai dilakukan pada tanggal 26 April s/d 31 Juli 2015.
7. Ujian meja hijau dan penyempurnaan rencana dilakukan pada bulan Agustus 2015.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Objek Penelitian

Kabupaten Simeulue adalah salah satu Kabupaten yang termuda di Provinsi Aceh, merupakan hasil perjuangan secara estafed dan berkelanjutan yang dimulai sejak tahun 1957 melalui Kongres Rakyat Simeulue di Luan Balu. Sebelum Tahun 1965 daerah ini merupakan salah satu kewedanaan dan merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Sejak Tahun 1967 berstatus sebagai wilayah pembantu Bupati dan selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1996 menjadi Kabupaten Administratif, kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 diresmikan menjadi Kabupaten Otonom berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 1999 bersamaan dengan Kabupaten Bireun Provinsi Aceh.

Ibukota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang, kalau diucapkan dengan logat daerah adalah *Si navang* yang berasal dari legenda Navang. Navang adalah si pembuat garam masa dulu di daerah Babang (pintu masuk teluk Sinabang. Dulunya Navang membuat garam dengan membendung air laut yang masuk ke pantai Babang, kemudian dikeringkan lalu menjadilah garam. Garam Navang lambat laun menjadi dikenal di sekitar Ujung Panarusan sampai ke Lugu. Jika penduduk membutuhkan garam, maka mereka akan menuju si Navang, yang lambat laun konsonan 'V' pada Navang berubah menjadi Nabang. Sementara *Sibigo* ibukota kecamatan Simeulue Barat berasal dari kata/kalimat *CV dan Co* karena masa-masa penjajahan dulu, Sibigo adalah lokasi perusahaan pengolahan

kayu Rasak - sejenis kayu sangat keras setara dengan Jati - yang dikirim ke Belanda via laut. Karena posisi geografisnya yang terisolasi dari Pulau Sumatera, hiruk-pikuk konflik di Aceh daratan tidak pernah berimbas di kawasan ini, bahkan tidak ada pergerakan GAM di kawasan kepulauan ini.

Sejak Belanda menghadapi perlawanan rakyat Aceh yang berlangsung 1893–1904 sebahagian besar wilayah kesultanan Aceh termasuk kepulauan Simeulue sudah dikuasai oleh Belanda, sehingga kesultanan Aceh di Simeulue sejak tahun 1901 yang disebut dengan Bano diganti dengan sebutan onderafdeling Simeulue berkedudukan di Sinabang, diperintah oleh seorang Controleur. Wilayah Onderafdeling Simeulue yang sebelumnya terdiri 5(bano) yaitu Bano Teupah, Bano Simulul, Bano Salang, Bano Sigulai dan Bano Leukon diganti dengan sebutan Landschap Teupah, Leandchap Simulul, Landschap Salang, Landschap Sigulai dan Landshap Leukon. Kabupaten Simeulue memiliki 10 kecamatan dan 138 desa yang tersebar pinggiran pulau Simeulue. Dasar pembentukan Kabupaten Simeulue di atur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999.

Selanjutnya, peneliti akan membahas hasil analisis penelitian dimulai dari hasil analisis validitas dan reliabilitas kuesioner sesuai dengan variabel penelitian, lebih jelasnya akan diuraikan.

B. Hasil Analisis Kuesioner

1. Hasil analisis validitas variabel pengawasan PNPM mandiri di kecamatan simeulue tengah kabupaten simeulue

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui kesahihan atau kecocokan angket atau kusioner untuk menjangking data kuantitatif yang dibutuhkan. Jika terdapat koefisiensi korelasi lebih besar ($>$) 0.349 dan taraf signifikan α sebesar 5% (0,05) disebut valid. Dengan taraf tersebut maka instrument dinyatakan valid. Nilai r hitung diambil dari output SPSS *Cronbach Alpha*. Sedangkan nilai r tabel dengan sampel 30 orang nilai r sebesar 0.349.

Dasar pengambilan keputusan untuk menguji validitas kusioner adalah:

- Jika r hitung $>$ r tabel, maka butir-butir kuesiner tersebut dikatakan valid.
- Jika r hitung $<$ r tabel maka butir-butir kuesiner tersebut dikatakan tidak valid.

Keabsahan atau kesahihan hasil penelitian sangat ditentukan oleh data diperoleh dari alat ukur yang digunakan. Untuk menguji apakah alat ukur (instrument) yang digunakan memenuhi syarat-syarat alat ukur yang baik, maka perlu dilakukan pengukuran sehingga menghasilkan data yang sesuai dengan apa yang diukur, sebelum dilakukan uji coba kusioner dengan sampel responden sebanyak 30 orang. Dari data yang terkumpul dilakukan validitas dan reliabilitas. Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas dapat disajikan pada uraian berikut. Instrumen untuk variabel pengawasan terdiri dari 12 pertanyaan, jika dibandingkan dengan r tabel = 0.349 akan tampak dalam kesimpulan. Artinya, setiap item butir pertanyaan r hitung $>$ r tabel maka dikatakan valid. Hasil perhitungan menunjukkan seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan (X)

Dimensi	Item Pernyataan	Korelasi	Kesimpulan
Pengawasan Pendahuluan	1	0.723	Valid
	2	0.536	Valid
	3	0.711	Valid
	4	0.759	Valid
Pengawasan Pada Waktu Kerja Berlangsung	5	0.822	Valid
	6	0.804	Valid
	7	0.651	Valid
	8	0.458	Valid
	9	0.759	Valid
Pengawasan Umpan Balik	10	0.420	Valid
	11	0.539	Valid
	12	0.711	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015

Berdasarkan Tabel 4.1. di atas menunjukkan bahwa item pernyataan yang digunakan dalam instrumen variabel implementasi kebijakan dapat dikatakan valid, sebab ke-12 pertanyaan/pernyataan tersebut melebihi nilai skor di atas 0.349 maka instrumen tersebut dikatakan memiliki validitas (kehandalan) atau layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Ini berarti bahwa setiap item pernyataan ini dapat digunakan untuk mengukur pengawasan di PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue tergolong valid.

2. Hasil analisis validitas variabel akuntabilitas

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui kesahihan atau kecocokan angket atau kusioner untuk menjangking data kuantitatif yang dibutuhkan. Jika terdapat koefisiensi korelasi lebih besar ($>$) 0.349 dan taraf signifikan α sebesar 5% (0,05) disebut valid. Dengan taraf tersebut maka instrument dinyatakan valid. Nilai r hitung diambil dari output SPSS *Cronbach Alpha*. Sedangkan nilai r tabel dengan sampel 30 orang nilai r sebesar 0.349.

Dasar pengambilan keputusan untuk menguji validitas kuesioner adalah:

- Jika r hitung $>$ r tabel, maka butir-butir kuesiner tersebut dikatakan valid.
- Jika r hitung $<$ r tabel maka butir-butir kuesiner tersebut dikatakan tidak valid.

Keabsahan atau kesahihan hasil penelitian sangat ditentukan oleh data diperoleh dari alat ukur yang digunakan. Untuk menguji apakah alat ukur (instrument) yang digunakan memenuhi syarat-syarat alat ukur yang baik, maka perlu dilakukan pengukuran sehingga menghasilkan data yang sesuai dengan apa yang diukur, sebelum dilakukan uji coba kuesioner dengan sampel responden sebanyak 30 orang. Dari data yang terkumpul dilakukan validitas dan reliabilitas. Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas dapat disajikan pada uraian berikut. Instrumen untuk variabel pengawasan terdiri dari 16 pertanyaan, jika dibandingkan dengan r tabel = 0.349 akan tampak dalam kesimpulan. Hasil perhitungan menunjukkan seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (Y)

Dimensi	Item Pernyataan	Korelasi	Kesimpulan
Akuntabilitas Politik	13	0.473	Valid
	14	0.460	Valid
	15	0.485	Valid
	16	0.416	Valid
	17	0.473	Valid
Akuntabilitas Finansial	18	0.541	Valid
	19	0.699	Valid
	20	0.460	Valid
	21	0.485	Valid
	22	0.485	Valid
Akuntabilitas Administratif	23	0.416	Valid
	24	0.568	Valid
	25	0.404	Valid
	26	0.454	Valid
	27	0.380	Valid
	28	0.384	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015

Berdasarkan Tabel 4.2. di atas menunjukkan bahwa item pernyataan yang digunakan dalam instrumen variabel akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri Kecamatan Simeulue Tengah di Kabupaten Simeuleu dapat dikatakan valid, sebab ke-16 pertanyaan/pernyataan tersebut melebihi nilai skor di atas 0.349. maka instrumen tersebut dikatakan memiliki nilai validitas (kehandalan)

atau layak digunakan sebagai instrument penelitian. Ini berarti bahwa item-item pernyataan ini dapat digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu dikatakan valid.

3. Hasil analisis pengujian reliabilitas pengawasan dan akuntabilitas

Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel pengawasan dan akuntabilitas menggunakan metode belah dua *split-half* dengan hasil yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3.
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengawasan dan Akuntabilitas
PNPM Mandiri di Kabupaten Simeulue

No	Variabel	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
1	Pengawasan	0,761	Reliabel
2	Akuntabilitas	0,770	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015

Berdasarkan Tabel 4.3. di atas menunjukkan bahwa item pernyataan yang digunakan dalam instrumen variabel pengawasan dan akuntabilitas penyaluran PNPM Mandiri Kecamatan Simeulue Tengah dikatakan reliabel. Dasar penentuan uji reliabilitas kuesioner penelitian ini mengacu kepada kriteria yang ditetapkan Barker, et. al. (2002:70) yang mengatakan apabila nilai skor yang diperoleh di atas 0,6 sebagai nilai batas suatu instrumen penelitian maka instrument penelitian itu reliable (dapat diterima /cukup baik). Dengan adanya uji reliabilitas ini maka diperoleh informasi bahwa jawaban responden terhadap kuesioner memperlihatkan kekonsistenan, sehingga hasil perolehan skor jawaban kuesioner

dapat dipergunakan dan dianalisis lebih lanjut.

Dengan adanya uji reliabilitas ini maka diperoleh informasi bahwa jawaban responden terhadap kuesioner memperlihatkan kekonsistenan, sehingga hasil perolehan skor jawaban kuesioner dapat dipergunakan dan dianalisis lebih lanjut.

C. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Dalam sub-bab ini akan disajikan dua analisis yaitu analisis statistik kuantitatif. Analisis deskriptif peneliti menyajikan gambaran menyeluruh sesuai dengan objek penelitian dan teori yang dijadikan rujukan untuk diuji melalui data empiris yang diperoleh atas dasar hasil penyebaran kuesioner. Pendeskripsian dan analisis variabel didasarkan pada akumulasi berbagai dimensi dan indikator, selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan analisis data primer maupun sekunder. Pengukuran atas variabel-variabel penelitian ditentukan berdasarkan penilaian sikap, persepsi atau pandangan responden terhadap setiap item pertanyaan yang diajukan kemudian data diolah dalam bentuk tabulasi frekwensi.

Untuk mengetahui kondisi variabel yang diamati maka dilakukan pengukuran melalui penyebaran angket. Angket variabel X yaitu pengawasan dan Y (akuntabilitas) dengan jumlah pertanyaan seluruhnya 28 pertanyaan yang masing-masing disertai 4 pilihan dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil jawaban responden yang merupakan skor untuk setiap item yang diperoleh dari jumlah nilai setiap item pertanyaan merupakan akumulatif jawaban dari 97 responden, selanjutnya dikelompokkan dengan kriteria penilaian menggunakan rentang skor ideal sebagai berikut :

Dengan jumlah responden = 97 orang, nilai skala pengukuran terbesar = 4, sedangkan skala pengukuran terkecil = 1, sehingga diperoleh nilai terbesar jumlah kumulatif = $97 \times 4 = 388$ dan nilai terkecil jumlah kumulatif = $97 \times 1 = 97$.

- Rentang skor maksimum dan minimum adalah $388 - 97 = 291$.
- Range skor untuk setiap kategori adalah $291 / 4 = 72.75$

Sehingga diperoleh klasifikasi kriteria penilaian skor seperti terdapat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Kriteria Penilaian Berdasarkan Rata-Rata Skor

No	Rentang Skor			Kategori
1	97.00	-	169.75	Tidak baik
2	169.76	-	242.51	Kurang Baik
3	242.52	-	315.27	Baik
4	315.28	-	388	Sangat Baik

Sumber : Hasil Perhitungan 2015

1. Variabel pengawasan

Variabel pengawasan terdiri atas 3 dimensi yaitu dimensi pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan feed back (*feed back control* yang dianggap menentukan keberhasilan pengawasan penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue. Variabel ini diukur dengan 12 item pertanyaan kuesioner. Berdasarkan rata-rata skor untuk setiap dimensi

diperoleh gambaran variabel pengawasan penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue sebagai berikut :

Tabel 4. 5
Skor Dimensi Variabel Pengawasan PNPM Mandiri di
Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue

No	Dimensi	Skor	Jumlah Item	Rata-rata Skor	Kategori
1	Pengawasan pendahuluan	756	4	189	Kurang Baik
2	Pengawasan pada waktu kerja berlangsung	885	5	177	Kurang Baik
3	Pengawasan feed back	552	3	184	Kurang Baik
	Pengawasan Penyaluran PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah	2193	12	183	Kurang Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015

Bila diinterpretasikan Tabel 4.5 di atas tampak bahwa variabel pengawasan PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah secara umum masih tergolong kurang baik dengan skor 108, walaupun salah dimensi memiliki skor 183 atau tergolong kurang baik. Artinya pengawasan yang dilakukan selama ini oleh PNPM Mandiri Kecamatan Simeulue Tengah masih perlu mendapat perhatian agar akuntabilitas penyaluran dana mandiri semakin lebih baik dilakukan oleh petugas PNPM Mandiri Kecamatan Simeulue Tengah.

Bila dikritisi dalam *Good governance* artinya pemerintahan/*governance* yang baik ditandai dengan adanya hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor Swasta dan Masyarakat yang melibatkan seluruh pelaku

(*stakeholders*) yang berkepentingan tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Para pelaku tersebut disamping pemerintah dari berbagai tingkatan, dapat pula berasal dari organisasi politik, LSM/NGO, dunia usaha/swasta bahkan lembaga internasional, sehingga *governance* yang berarti administrasi Negara mempunyai konotasi sebagai administrasi publik yang mengurus kepentingan masyarakat (penduduk, warga negara dan rakyatnya), dimana birokrasi/pemerintahan menerapkan berbagai disiplin.

Dengan demikian prinsip dan paradigma *good governance* harus masuk bila administrasi publik ingin berpredikat baik. Prinsip prinsip *good governance* seperti partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesamaan, ketanggapan, visi strategis, akuntabilitas dan supervisi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme dengan paradigma yang disepakati (misalnya partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik) harus benar benar bisa diwujudkan khususnya dalam penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah secara akuntabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 101 tahun 2000 menyebutkan ciri-ciri pemerintahan yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan setiap dimensi-dimensi pengawasan sebagaimana disajikan pada uraian berikut.

a. Dimensi pengawasan pendahuluan.

Dimensi pengawasan pendahuluan diukur dengan 4 indikator yang meliputi, kejelasan target, kejelasan standar waktu penyelesaian target, kesesuaian metode pengukuran, kepatuhan terhadap peraturan. Hasil tanggapan responden untuk setiap indikator secara umum menunjukkan dimensi ini kurang baik dengan skor 189. Ini menggambarkan bahwa pengawasan

pendahuluan belum ditetapkan dengan baik dari sudut penetapan target kerja yang hendak dicapai terutama target penyaluran dan kelompok sasaran penerima PNPM mandiri.

Dengan adanya penetapan target merupakan pintu masuk melakukan pengawasan pendahuluan untuk memantau apakah petugas PNPM mandiri bekerja dengan sungguh-sungguh. Dengan kejelasan standar akan dapat mengarahkan semua potensi petugas PNPM Mandiri sekaligus sebagai alat evaluasi diri para petugas PNPM Mandiri. Jika tidak ada penetapan target sasaran kelompok masyarakat penerima PNPM Mandiri ini diakibatkan belum adanya dasar penentuan standar yang jelas dan terukur seperti standar waktu, standar biaya, standar administrasi dan standar kelompok sasaran penerima dana PNPM Mandiri. P Sesungguhnya, pengawasan tidak mungkin dilakukan tanpa adanya suatu perangkat kriteria (alat ukur) yang harus ditetapkan sebelumnya guna mengukur penyelenggaraan, standar atau kriteria biasanya digunakan untuk mengukur efektivitas dari suatu organisasi baik untuk mengukur tugas, jabatan atau penuaian kewajiban". Artinya, standar sangat penting ditetapkan dalam bekerja agar lebih mudah melakukan penilaian kinerja petugas PNPM Mandiri.

Sesungguhnya, ditetapkannya standar atau patokan akan dapat mengukur kinerja pegawai, untuk mengetahui apakah petugas PNPM Mandiri mampu melaksanakannya atau tidak. Jika petugas tidak mampu mencapai sesuai standar dan kemudian dibarengi dengan sanksi yang tegas dari pimpinan maka mereka akan terdorong bekerja.

b. Dimensi pengawasan pada waktu kerja berlangsung.

Dimensi pengawasan pada waktu kerja berlangsung diukur dengan 5 indikator yaitu intensitas pengukuran, bentuk pengukuran, penyimpangan yang terjadi, capaian target yang diinginkan dan sanksi bila target tidak tercapai. Hasil tanggapan responden untuk setiap indikator secara umum menunjukkan dimensi pengawasan pada waktu kerja berlangsung tergolong kurang baik dengan skor 177. Ini menggambarkan bahwa pengawasan pada waktu kerja berlangsung seperti speksi mendadak (Sidak) jarang dilakukan oleh pimpinan dengan baik.

Dikatakan kurang baik juga diakibatkan belum adanya alat ukur yang terukur dan objektif. Misalnya, mengukur berat badan dengan timbangan, termometer untuk mengukur suhu badan. Jika tidak ada alat ukur untuk melakukan speksi mendadak sulit ditemukan objektivitasnya seperti alat ukur menentukan intensitas pengukuran, bentuk pengukuran, serta melihat penyimpangan yang terjadi. Dimensi pengawasan pada waktu kerja berlangsung sangat penting dilakukan oleh pimpinan PNPM Mandiri apakah kegiatan sasaran penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan harapan publik.

c. Dimensi pengawasan feed back (umpak balik).

Dimensi pengawasan umpan balik yaitu tindakan melakukan perbaikan diukur dengan 3 indikator yang meliputi upaya perbaikan target (hasil), upaya pelaksanaan pengukuran, penjatuhan hukuman bagi pegawai yang menyimpang. Hasil tanggapan responden untuk setiap indikator secara

umum menunjukkan dimensi pengawasan umpan balik tergolong kurang baik dengan skor 184. Ini menggambarkan bahwa pimpinan PNPM Mandiri Kabupaten Simeulue telah menerapkan prinsip pengawasan dengan cara melakukan koreksi atau perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi, namun belum optimal untuk mewujudkan akuntabilitas penggunaan dana PNPM Mandiri.

Bila pimpinan tidak menerapkan sanksi kepada petugas yang tidak mencapai target semacam hukuman maka pegawai yang mencapai target dengan tidak mencapai target biasa-biasa saja. Manakalah petugas bekerja di atas standar dan pimpinan memberikan pujian atau penghargaan maka akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri semakin akuntabel. Memusatkan perhatian pada hasil-hasil akhir maka pengawasan dengan melakukan tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi-operasi aktual. Tipe pengawasan ini mencapai namanya dari fakta bahwa hasil-hasil historikal mempengaruhi tindakan-tindakan masa mendatang.

2. Variabel akuntabilitas

Variabel akuntabilitas penyaluran dan PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue terdiri dari dimensi (1) akuntabilitas politik, (2) akuntabilitas financial, (3) akuntabilitas administratif. Variabel ini diukur dengan 16 item pertanyaan kuesioner. Berdasarkan rata-rata skor untuk setiap dimensi diperoleh gambaran variabel akuntabilitas PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue tsebagai berikut :

Tabel 4.6
Skor Dimensi Variabel Akuntabilitas

No	Dimensi	Jumlah item	Total skor	Rata-rata Skor	Kategori
1	Akuntabilitas Politik	5	1140	228	Kurang Baik
2	Akuntabilitas financial.	5	1280	256	Baik
3	Akuntabilitas administratif	6	1386	231	Kurang Baik
	Variabel Akuntabilitas PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue	16	3806	238	Kurang Baik

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2015 (diolah).

Dari tabel 4.6 di atas terlihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel akuntabilitas masuk kategori kurang baik dengan skor 238. Ini menggambarkan bahwa secara umum akuntabilitas penyaluran dan PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue dari sudut dimensi (1) akuntabilitas politik, (2) akuntabilitas financial, (3) akuntabilitas administratif tergolong kurang baik.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) bahwa akuntabilitas salah satu dimensinya harus didukung dengan pengalaman kerja yang memadai. Itu sebabnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 pada Bab 14, butir D (5) yang berkata “bahwa perlu dilakukan pelayanan publik yang bermutu, transparan, *akuntabel*, mudah, murah, cepat, patut, dan adil kepada seluruh masyarakat guna

menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Akuntabel tentu saja petugas PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah harus memahami peraturan, memiliki pengalaman dan sebagainya

Petugas PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan agar pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas semakin dirasakan oleh publik dan sesuai dengan tuntutan publik. Semakin akuntabel petugas dalam menjalankan tugasnya maka kepercayaan publik kepada pemerintah semakin baik. Lebih jelasnya setiap dimensi-dimensi akuntabilitas dapat disajikan pada uraian berikut.

a. Dimensi akuntabilitas politik

Dimensi akuntabilitas politik diukur dengan 5 indikator yang meliputi Standardisasi, Prosedural, publikasi laporan kepublik, audit akuntan publik dan kontrol dari masyarakat. Hasil tanggapan responden untuk setiap indikator secara umum menunjukkan dimensi akuntabilitas politik tergolong kurang baik dengan skor 228. Ini menggambarkan bahwa pimpinan PNPM Mandiri belum dapat melakukan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari sudut politik. Artinya, dilakukannya kegiatan penyaluran dana PNPM Mandiri adalah memiliki unsur politik. Secara politik masyarakat memahami kegiatan ini untuk membantu masyarakat itu sendiri untuk diingat pada waktu pilpres atau pilkada.

b. Dimensi akuntabilitas financial

Dimensi akuntabilitas financial diukur dengan 3 indikator yang meliputi ketaatan petugas kepada peraturan, integritas, pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan, mengikuti prinsip-prinsip keuangan, membuat

laporan keuangan. Hasil tanggapan responden untuk setiap indikator ini secara umum menunjukkan dimensi akuntabilitas financial tergolong kurang baik dengan skor 256. Ini menggambarkan bahwa pimpinan PNPM Mandiri secara akuntabel telah mampu mempertanggungjawabkan keuangan penyaluran PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah dengan baik. Pertanggungjawaban keuangan harus dilakukan dengan baik agar benar-benar akuntabel. Artinya, setiap satu sen penggunaan dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah harus akuntabel sebagai ciri dari pemerintahan yang baik.

c. Dimensi akuntabilitas administratif

Dimensi akuntabilitas administratif diukur dengan 6 indikator yang meliputi prosedural, moralitas, etika, kepastian hukum, memiliki nilai dan azas kepatutan. Hasil tanggapan responden untuk setiap indikator secara umum menunjukkan dimensi pengawasan umpan balik tergolong kurang baik dengan skor 231. Ini menggambarkan bahwa pimpinan PNPM Mandiri telah melaksanakan kegiatan administratif tentang penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah namun kurang baik. Hal ini disebabkan karena penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah ini melibatkan masyarakat untuk mempertanggungjawabkan dana yang mereka pakai. Sementara masyarakat yang mendapatkan dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah masih ada yang belum melek (pintar) yang penting bagi mereka dapat bantuan dari pemerintah sementara bagaimanapun prosedur

pertanggungjawaban belum optimal dilaksanakan sesuai dengan prosedur penggunaan dana seperti bukti-bukti kas dan sebagainya.

D. Pengujian Hipotesis

1. Pengujian statistik simultan (secara total/serentak)

Sebagaimana disajikan pada bab III terdahulu penelitian ini akan dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi ganda, tetapi sebelum sampai kepada pengujian hipotesis peneliti akan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Sebab aturan menggunakan regresi ganda apabila data yang diperoleh diasumsikan memenuhi (1) normalitas, (2) heteroskedastisitas, (3) multikolinearitas (4) autokorelasi.

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk menguji kebenaran model regresi linier berganda yaitu pengaruh dimensi pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan feed back (*feed back control*) terhadap akuntabilitas penyaluran dan PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah. Untuk dapat menggunakan regresi berganda, maka data yang digunakan harus memenuhi persyaratan asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. Asumsi-asumsi tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

a. Uji normalitas

Normalitas dalam statistik parametrik seperti regresi dan Anova merupakan syarat pertama. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid atau bias terutama untuk

normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid atau bias terutama untuk populasi kecil yaitu sebanyak 97 orang pegawai. Uji normalitas dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu melalui pendekatan grafik (histogram dan P-P Plot) atau uji kolmogorov-smirnov, chi-square, Liliefors maupun Shapiro-Wilk. Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada lampiran data *print out* dibawah ini:

Tabel 4.7.
Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

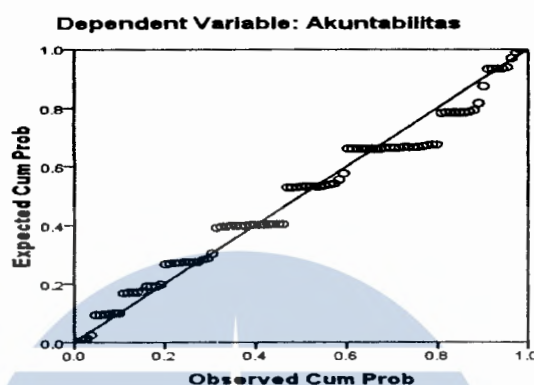
		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.87029569
Most Extreme Differences	Absolute	.128
	Positive	.128
	Negative	-.081
Kolmogorov-Smirnov Z		1.258
Asymp. Sig. (2-tailed)		.084
a. Test distribution is Normal.		

Berdasarkan hasil Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 1.258 ini mencerminkan bahwa nilai signifikansi 0.085 lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan

bahwa data yang diuji dalam penelitian ini berdistribusi normal pada gambar berikut ini.

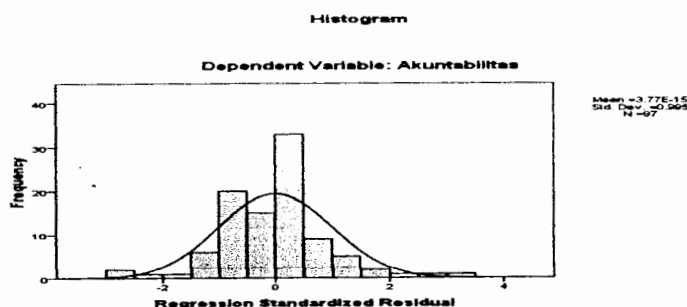
Gambar 4.1

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.1 menunjukkan nilai-nilai sebaran error yang berupa dot terletak di sekitar garis lurus dan tidak terpencar jauh dari garis lurus maka disimpulkan bahwa persyaratan asumsi normalitas terpenuhi, artinya uji regresi ganda tentang variabel akuntabilitas penyaluran dan PNPM Mandiri layak digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, bila dilihat dari data dari distribusi sebagaimana disajikan pada gambar berikut:

Gambar 4.2
Histogram Uji Normalitas Data Variabel Y



Histogram pada gambar 4.2 menjelaskan bahwa data distribusi nilai residu (error) menunjukkan bahwa data berdistribusi normal yang diperlihatkan oleh

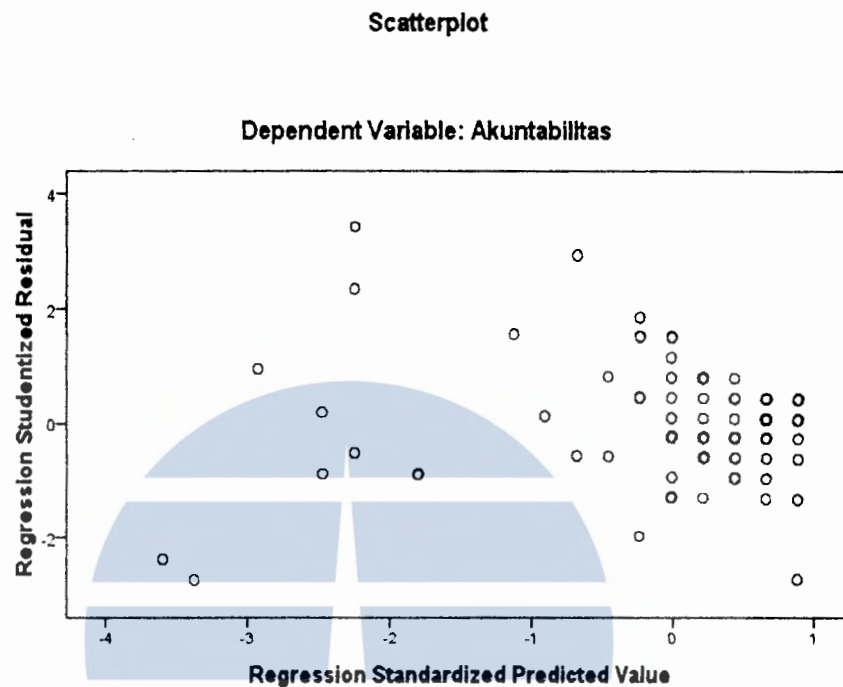
garis lengkung berbentuk bel. Dengan demikian pada gambar 4.1 dan 4.2 memberi kesimpulan bahwa residu dari model dianggap berdistribusi normal. Kedua gambar tersebut menunjukkan model regresi memenuhi asumsi normalitas dalam penelitian ini.

b. Uji heteroskedastitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pada model yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari model *Scatterplot* model tersebut.

Jika model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian, jika output *Scatterplot* menunjukkan penyebaran titik-titik data yang tidak berpola jelas, serta titik-titik yang menyebar. Pendekatan lain untuk pengujian heteroskedastisitas adalah dengan pendekatan statistik. Gambar 4.3 dibawah ini menunjukkan bahwa model regresi bahwa residu yang ada mempunyai varians yang konstan dan regresi tidak terlihat residu meningkat atau menurun dengan pola tertentu. Grafik memberi makna bahwa tidak ada heterokedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar *scatterplot* berikut ini:

Gambar 4.3
Scatterplot Uji Heteroskedastisitas



c. Uji multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara satu variabel dependent dengan variabel independent bersifat linier dalam model regresi. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam uji multikolinearitas adalah tidak terjadi masalah multikolinearitas apabila nilai VIF dibawah 10 dan sebaliknya jika nilai VIF melebihi angka 10, maka disimpulkan telah terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	17.790	2.659		6.691	.000		
	Pengawasan	1.023	.066	.847	15.513	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Berdasarkan gambar pada tabel 4.8 diketahui nilai VIF kurang dari 10 atau hanya berada pada kisaran maksimal 1.000 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas atau masih bisa ditoleransi. Dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh antara variabel independent (pengawasan) terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri bersifat linier dalam model regresi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi multikolinearitas terpenuhi.

d. Uji autokorelasi

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilihat dari uji Durbin-Watson standar untuk menentukan adanya atau tidaknya autokorelasi secara umum adalah:

- 1) Angka DW = 2 berarti autokorelasi positif
- 2) Angka DW < 1.5 berarti ada gejala autokorelasi
- 3) Angka DW diantara 1.5 – 2.5 berarti tidak ada autokorelasi
- 4) Angka DW diatas > 2 – 4 berarti ada autokorelasi negatif

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.9
Uji Autokorelasi Variabel X terhadap Variabel Y

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.847 ^a	.717	.714	2.88536	1.971

a. Predictors: (Constant), Pengawasan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Dari tabel 4.9 diatas didapatkan nilai Durbin Watson sebesar 1,971. Pengukuran di atas berdasarkan variabel Y sebagai variabel dependennya. Karena nilai DW (Durbin-Watson) berada diantara 1.000 – 2,000 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak memperlihatkan adanya gejala otokorelasi. Dengan demikian berdasarkan asumsi-asumsi statistik di atas maka alat uji regresi ganda yang digunakan dalam penelitian ini memehuni asumsi yang diharapkan. Karena itu pengujian hipotesis menggunakan regresi ganda dapat dilanjutkan pada uraian berikut.

e. Regresi linear berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen (bebas) berskala kuantitatif terhadap satu variabel dependen (tidak bebas). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengawasan pendahuluan (*preliminary control* = X_1), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control* = X_2), pengawasan feed back (*feed back control* = X_3) terhadap variabel dependen Y yaitu akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri. Regresi linier berganda ini juga digunakan untuk mengetahui

apakah perilaku aparaturnya dimasa akan datang akan bisa diramalkan oleh faktor adalah pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan feed back (*feed back control*).

Adapun persamaan regresi berganda yaitu $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$. Lebih jelasnya, hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.10
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.924	2.508		5.152	.000		
	X1	2.505	.277	.560	9.054	.000	.578	1.730
	X2	.683	.157	.313	4.354	.000	.428	2.335
	X3	.560	.203	.163	2.763	.007	.639	1.565

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Dari tabel 4.10 di atas maka persamaan regresi yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah : Akuntabilitas PNPM Mandiri (Y) = 12.924 + 2.505X₁ + 0.683X₂ + 0.560 X₃ + persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Y = Konstanta = 12.924 ini menunjukkan nilai rata-rata Y apabila X₁, X₂, X₃, X₄ bernilai nol. Artinya, apabila pimpinan PNPM Mandiri Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue tidak mampu menerapkan dimensi seluruh pengawasan maka akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri akan tetap ada sebesar 12.924. Sebaliknya, apabila

pimpinan pimpinan PNPM Mandiri Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu mampu menerapkan dimensi-dimensi pengawasan maka akuntabilitas penyaluran dan PNPM Mandiri akan naik satu satuan. Misalnya jika dimensi comparasi (perbandingan) dilaksanakan yaitu pimpinan melakukan perbandingan antara standar dengan hasil (relalisasi) penyaluran dana PNPM dan ternyata dibawah target kemudian pimpinan menerapkan koreksian dengan benar maka akuntabilitas semakin baik. Meski demikian yang mempengaruhi akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri masih ada juga variabel lain yang tidak terdeteksi ($\epsilon/epsilon$) yang turut mempengaruhinya. Misalnya, etika, moralitas dan tata nilai serta ketegasan pimpinan, sarana dan prasarana, lingkungan kerja dan lain-lain.

- b. Koefisien regresi X_1 (pengawasan pendahuluan) = 2.505. Artinya, apabila terdapat penataan dimensi pengawasan pendahuluan dalam bekerja sebesar satu satuan sementara variabel independen lainnya tetap maka PNPM Mandiri Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu akan mengalami peningkatan sebesar 2.505.
- c. Koefisien regresi X_2 (pengawasan pada waktu kerja berlangsung = 0.683. Artinya, apabila terdapat pembenahan dimensi pengawasan pada waktu kerja berlangsung sebesar satu satuan maka akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu akan mengalami peningkatan sebesar 0.683

d. Koefisien regresi X_3 (pengawasan feed back) = 0.560. Artinya, apabila terdapat peningkatan variabel pengawasan feed back sebesar satu satuan sementara variabel independen lainnya tetap maka akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue akan mengalami peningkatan sebesar 0.683.

f. Uji koefisien determinasi (R^2)

Jika diamati dimensi pengawasan yang paling besar memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri Kecamatan penyaluran Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue adalah dimensi pengawasan pendahuluan (*preliminary control*) sebesar 2.505. Artinya, kontribusi dimensi ini merupakan juru kunci dalam melakukan pengawasan. Sebab dengan pengawasan pendahuluan akan tampak siapa sesungguhnya dan masyarakat mana yang patut mendapat dana bantuan tersebut. Jika dimensi ini salah sasaran maka dimensi lain tidak bermakna.

Selanjutnya, dilakukan pengujian koefisien determinasi atau R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel dependen yaitu adalah pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan feed back (*feed back control*) dapat menjelaskan atau meramalkan variabel independen (Y) yaitu akuntabilitas penyaluran dan PNPM Mandiri. Hasil perhitungan koefisien determinasi atau R.square (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.891 ^a	.794	.788	2.48636	2.096

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber : Data Primer 2015

Dari hasil perhitungan untuk nilai R^2 dalam analisis regresi berganda di atas maka diperoleh angka koefisien determinasi R.square atau R^2 sebesar 0,794, artinya 79.4% variasi variable pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan feed back (*feed back control*) dapat menjelaskan variabel independen (Y) yaitu akuntabilitas penyaluran dan PNPM Mandiri . Atau akuntabilitas penyaluran dan PNPM Mandiri dipengaruhi oleh pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan feed back (*feed back control*). Sedangkan sisanya 20.6% dijelaskan oleh variabel residualnya atau variabel lain yang tidak diteliti (epsilon) dalam penelitian ini, misalnya etika, moralitas dan tata nilai serta ketegasan pimpinan, sarana dan prasarana, lingkungan kerja dan lain-lain.

E. Uji Hipotesis Secara Parsial (satu Persatu)

Sebagaimana disajikan pada Bab II terdahulu bahwa hipotesis yang di ajukan dalam peneitian ini ada empat butir, keempat butir tersebut akan diuji satu persatu.

1. Ada Pengaruh Dimensi Pengawasan Pendahuluan terhadap Akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dimensi pengawasan pendahuluan terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue maka dilakukan pengujian dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \rho_{X_1Y} = 0$ Tidak terdapat pengaruh dimensi pengawasan pendahuluan terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.

$H_1 : \rho_{X_1Y} > 0$ Terdapat pengaruh dimensi pengawasan pendahuluan terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.

Kriteria pengujian menggunakan alat uji t apabila:

Jika $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} dengan $\alpha 0.05$ dan derajat bebas yaitu $n-k-1$ yaitu $97-3-1 = 93$ dengan nilai $t_{tabel} 1.66140$ maka h_0 ditolak. Artinya ada pengaruh sub variabel bebas yaitu X_1 terhadap Y .

Jika $t_{hitung} <$ dari t_{tabel} dengan $\alpha 0.05$ dan derajat bebas yaitu $n-k-1$ yaitu $53-4-1 = 93$ dengan nilai $t_{tabel} 1.66140$ maka h_0 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh sub variabel bebas yaitu X_1 , terhadap Y .

Selanjutnya jika dilakukan perhitungan dan mengamati hasil perhitungan SPSS dimana nilai t_{hitung} variabel pengawasan pendahuluan sebesar 9.054 sedangkan t tabel sebesar 1.66140 karena t hitung lebih besar dari t tabel maka disimpulkan ada pengaruh dimensi pengawasan pendahuluan terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue. Hal ini membuktikan bahwa pengujian hipotesis pertama yang diajukan di Bab II menyatakan terdapat pengaruh dimensi pengawasan pendahuluan terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue benar dan terbukti. Artinya, pengawasan pendahuluan terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue dapat membentuk akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue untuk responden 97 orang.

2. Ada Pengaruh Dimensi Pengawasan Pada Waktu Kerja Berlangsung terhadap Akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dimensi pengawasan pada waktu kerja berlangsung terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu maka dilakukan pengujian dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \rho_{X_2Y} = 0$ Tidak terdapat pengaruh dimensi pengawasan pada waktu kerja berlangsung terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.

$H_1 : \rho_{X_2Y} > 0$ Terdapat pengaruh dimensi pengawasan pada waktu kerja berlangsung terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.

Kriteria pengujian menggunakan alat uji t apabila:

Jika $t_{hitung} >$ dari t tabel dengan α 0.05 dan derajat bebas yaitu $n-k-1$ yaitu $97-3-1 = 93$ dengan nilai t tabel 1.66140 maka H_0 ditolak. Artinya ada pengaruh sub variabel bebas yaitu X_2 terhadap Y .

Jika $t_{hitung} <$ dari t tabel dengan α 0.05 dan derajat bebas yaitu $n-k-1$ yaitu $53-4-1 = 93$ dengan nilai t tabel 1.66140 maka H_0 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh sub variabel bebas yaitu X_2 , terhadap Y .

Selanjutnya jika dilakukan perhitungan dan mengamati hasil perhitungan SPSS dimana nilai t_{hitung} variabel pengawasan pada waktu kerja berlangsung sebesar 4.354 sedangkan t tabel sebesar 1.66140 karena t_{hitung} lebih besar dari t tabel maka disimpulkan ada pengaruh dimensi pengawasan pada waktu kerja berlangsung terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu. Hal ini membuktikan bahwa pengujian hipotesis kedua yang diajukan di Bab II menyatakan terdapat pengaruh dimensi pengawasan pada waktu kerja berlangsung terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu benar dan terbukti. Artinya, pengawasan pada waktu kerja berlangsung terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu dapat membentuk akuntabilitas penyaluran dana PNPM

Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue untuk responden 97 orang.

3. Ada Pengaruh Dimensi Pengawasan *Feed Back* Pendahuluan terhadap Akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dimensi pengawasan *feed back* terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue maka dilakukan pengujian dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \rho_{X_3Y} = 0$ Tidak terdapat pengaruh dimensi pengawasan *feed back* terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.

$H_1 : \rho_{X_3} > 0$ Terdapat pengaruh dimensi pengawasan *feed back* terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.

Kriteria pengujian menggunakan alat uji t apabila:

Jika $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} dengan α 0.05 dan derajat bebas yaitu $n-k-1$ yaitu $97-3-1 = 93$ dengan nilai t_{tabel} 1.66140 maka H_0 ditolak. Artinya ada pengaruh sub variabel bebas yaitu X_3 terhadap Y .

Jika $t_{hitung} <$ dari t_{tabel} dengan α 0.05 dan derajat bebas yaitu $n-k-1$ yaitu $53-4-1 = 93$ dengan nilai t_{tabel} 1.66140 maka H_0 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh sub variabel bebas yaitu X_3 , terhadap Y .

Selanjutnya jika dilakukan perhitungan dan mengamati hasil perhitungan SPSS dimana nilai t_{hitung} variabel pengawasan *feed back* sebesar 2.763 sedangkan t tabel sebesar 1.66140 karena t hitung lebih besar dari t tabel maka disimpulkan ada pengaruh dimensi pengawasan *feed back* terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu. Hal ini membuktikan bahwa pengujian hipotesis ketiga yang diajukan di Bab II menyatakan terdapat pengaruh dimensi pengawasan *feed back* terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu benar dan terbukti. Artinya, pengawasan *feed back* terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu dapat membentuk akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu untuk responden 97 orang.

F. Uji Variabel Pakai Tabel Anova atau Uji Simultan (F_{test})

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel pengaruh dimensi yaitu pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan *feed back* (*feed back control*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a. $H_0 : b_1, b_2, b_3, = 0$, berarti tidak terdapat pengaruh positif secara bersama-sama dari seluruh dimensi yaitu dimensi pengawasan pendahuluan

(*preliminary control*), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan feed back (*feed back control* terhadap variabel tidak bebas Y yaitu akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeule

- b. $H_0 : b_1, b_2, b_3, \neq 0$, berarti terdapat pengaruh positif secara bersama-sama dari seluruh dimensi yaitu dimensi dimensi pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan feed back (*feed back control* terhadap variabel tidak bebas Y yaitu akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. H_0 diterima H_a ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitasnya F signifikan $> 0,05$
- b. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitasnya nilai F signifikan $< 0,05$

Hasil uji F dapat dilihat pada tampilan data *print out* berikut ini:

Tabel 4.12

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2219.531	3	739.844	119.678	.000 ^a
	Residual	574.922	93	6.182		
	Total	2794.454	96			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Dari hasil analisis regresi pada tabel 4.12 di atas didapatkan hasil perhitungan untuk nilai F_{hitung} sebesar $119.678 > F_{tabel}$ sebesar 2,70 (siginifican). Artinya, jika dibandingkan F hitung dengan F tabel ternyata F hitung $>$ dari F tabel. Artinya, terdapat pengaruh secara bersama-sama atau serentak dimensi pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan feed back (*feed back control* terhadap variabel tidak bebas Y yaitu akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu dengan demikian model regresi ganda ini cukup baik digunakan untuk menghitung pengaruh dimensi pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan feed back (*feed back control* terhadap variabel tidak bebas Y yaitu akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu. Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan statistik dan kriteria keputusan penerimaan dan penolakan hipotesis dapat dikatakan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti pada bab terdahulu adalah terbukti dan dapat diterima.

Adanya pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah Wulandari dalam tesisnya Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintahan Kota Padang. Peneliti menyimpulkan ada pengaruh positif dan signifikan pengawasan terhadap akuntabilitas (Jurnal Akuntansi Vol 1. Nomor 3 Tahun 2013) diakses <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/677> diakses 25 Maret 2015.

Penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah (Jurnal Ilmia Ranggading vol 12 No. 2, oktober 20012: 82-

93), penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun simultan. Hal ini mengandung makna baik secara parsial maupun simultan bilamana peraturan perundang-undangan diterapkan; semakin baiknya laporan keuangan pemerintah; dan diterapkan pengawasan yang memadai; maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

G. Pembahasan

Tujuan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat agar terhindar dari kemiskinan. Sebab Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Karena itu, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.

Sejauhmana pengawasan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan itu dilaksanakan di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan teori Winardi (2000: 259) yang mengatakan kesuksesan pengawasan terdiri dari pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan feed back (*feed back control*). Sedangkan rujukan teori akuntabilitas teori Djoko Susilo, (2005:331) yang mengatakan ada tiga dimensi

akuntabilitas yaitu (1) akuntabilitas politik, (2) akuntabilitas financial. (3) akuntabilitas administratif.

Jika diamati secara umum pelaksanaan pengawasan penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan itu dilaksanakan di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue secara umum belum tergolong baik dengan skor 108, walaupun salah dimensi memiliki skor 183 atau tergolong kurang baik. Artinya pengawasan yang dilakukan selama ini oleh PNPM Mandiri Kecamatan Simeulue Tengah masih perlu mendapat perhatian agar akuntabilitas penyaluran dana mandiri semakin lebih baik dilakukan oleh petugas PNPM Mandiri Kecamatan Simeulue Tengah.

Demikian juga akuntabilitas dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu secara umum kategori kurang baik dengan skor 238. Ini menggambarkan bahwa secara umum akuntabilitas penyaluran dan PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue dari sudut dimensi (1) akuntabilitas politik, (2) akuntabilitas financial. (3) akuntabilitas administratif tergolong kurang baik.

Jika dilakukan hasil pengujian hipotesis sebagaimana disajikan pada Bab II yang terdiri dari tiga hipotesis hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh ketiga dimensi pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan feed back (*feed back control*) terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri Kecamatan Simeulue Tengah. Dari ketiga dimensi itu, tampak bahwa dimensi yang paling besar memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri Kecamatan Simeulue Tengah adalah dimensi pengawasan pendahuluan (*preliminary control*) dengan skor 2.505. Artinya, dimensi pengawasan

pendahuluan (*preliminary control*) ini merupakan juru kunci melakukan pengawasan agar terwujud akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri. Sebagaimana diketahui Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengaktifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Agar keempat misi tersebut terwujud harus dilakukan pengawasan pendahuluan terutama ketika mendanai pembangunan di setiap desa. Sebab sebelum dana disalurkan harus dilakukan survey pendahuluan desa mana yang paling utama mendapat dana pembangunan.

Karena itu, pengawasan pendahuluan sangat penting dilaksanakan sebagai pedoman utama agar terwujud akuntabilitas. Pengawasan pendahuluan ini dapat dipahami ketika masyarakat melakukan permohonan pengajuan dana PNPM untuk perbaikan jalan dapat disampaikan melalui BKM di kelurahan masing-masing. Hanya pastikan bahwa perbaikan jalan tersebut masuk ke dalam dokumen di kelurahan tersebut.

Pentingnya pengawasan pendahuluan dilakukan sebagaimana diketahui permintaan dana PNPM Mandiri harus mengikuti seleksi yang ketat. Seleksi/ Prioritas Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan yang paling prioritas/ mendesak. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai,

diambil dalam forum musyawarah antar-desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah *open menu* untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (*negative list*). Dalam hal terdapat usulan masyarakat yang belum terdanai, maka usulan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Keseluruhan proses tersebut tentu saja membutuhkan pengawasan pendahuluan agar penggunaan dana PNPM Mandiri tidak salah sasaran.

Demikian juga pelaksanaan dimensi pengawasan ketika kegiatan sedang berlangsung harus dilakukan agar kegiatan sedang berlangsung akuntabel. Jika diamati hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pengawasan ketika kegiatan sedang berlangsung tergolong kurang baik dengan skor 177. Ini menggambarkan bahwa pengawasan pada waktu kerja berlangsung seperti speksi mendadak (Sidak) jarang dilakukan oleh pimpinan dengan baik oleh PNPM Mandiri Kecamatan Simeulue Tengah. Pentingnya pengawasan ini dilakukan agar tidak terjadi penyaluran dana PNPM Mandiri tidak salah sasaran atau masuk ke rekening pribadi anggota masyarakat. Sebab penyaluran dana ini perlu diawasi. Sebagaimana diketahui PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan.

Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat

harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/ dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.

Dalam pelaksanaannya, pengalokasikan dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*cost sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Besarnya *cost sharing* ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/ PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006.

Melihat kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ditargetkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di perdesaan, maka program ini harus diawasi agar tidak menyimpang dari sasaran yang ditetapkan sebelumnya.

Demikian juga pelaksanaan dimensi pengawasan umpan balik. Hasil tanggapan responden untuk setiap indikator secara umum menunjukkan dimensi pengawasan umpan balik tergolong kurang baik dengan skor 184. Ini menggambarkan bahwa pimpinan PNPM Mandiri Kabupaten Simeulue telah menerapkan prinsip pengawasan dengan cara melakukan koreksi atau perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi, namun belum optimal untuk mewujudkan akuntabilitas penggunaan dana PNPM Mandiri.

Pentingnya dilakukan dimensi pengawasan ini dilakukan agar misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Karena itu perlu dilakukan pengawasan seluruh kegiatan dengan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan, melihat kinerja semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.

Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk pelatihan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dan masyarakat. Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu : masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, konsultan, fasilitator, LSM, wartawan, lembaga donor, dan lain-lain.

Jenis kegiatan pemantauan dalam PNPM Mandiri yang dapat dilakukan oleh PNPM Mandiri Kecamatan Simeulue Tengah meliputi : Pemantauan dan pengawasan partisipatif oleh Masyarakat yaitu pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan program, dan mereka bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi proses kegiatan program. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan melalui musyawarah desa. Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat desa dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat. Diharapkan anggota tim ini terdiri dari warga dusun yang ada serta merupakan tokoh agama/adat/masyarakat setempat. Mereka mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desanya. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, musyawarah desa juga menetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam pemantauan dan pengawasan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa.

Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah sebab dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah, sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPM Mandiri Perdesaan (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PjOK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau PNPM Mandiri Perdesaan.

Pegawai pemerintah harus sering mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun mendesak untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada atau memeriksa beberapa hal yang menjadi tugas pemantauan dan pemeriksaan fasilitator. Pemantauan dan Pemeriksaan Berjenjang koordinator wilayah, manajemen provinsi, fasilitator kabupaten dan kecamatan, dan pendamping lokal bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Mereka wajib melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sesuai dengan rencana dan apakah prinsip maupun prosedur PNPM Mandiri Perdesaan diterapkan dengan benar.

Demikian juga akuntabilitas penyaluran dan PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah harus dijaga dengan baik. Sebab hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas masuk kategori kurang baik dengan skor 238. Ini menggambarkan bahwa secara umum akuntabilitas penyaluran dan PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue dari sudut dimensi (1) akuntabilitas politik, (2) akuntabilitas financial. (3) akuntabilitas administratif tergolong kurang baik.

Karena itu agar akuntabel harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh konsultan atau fasilitator meliputi: (a) pemeriksaan terhadap penerapan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan. (b) pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan. (c) pemeriksaan terhadap poses pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dokumen dan administrasi. (d) pemeriksaan terhadap kualitas proses pelaksanaan dari setiap tahapan kegiatan. Audit dan Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan rutin

dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan atau Pendamping Lokal pada setiap kunjungan ke desa untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan dananya. Hasil pemeriksaan rutin dibahas bersama Tim Pengelola Kegiatan, kemudian mereka diberi saran-saran perbaikan yang ditulis dalam buku bimbingan. Audit Internal dilakukan oleh kedua Fasilitator Kabupaten, Manajemen Provinsi, dan KM-Nas. Audit internal meliputi pemeriksaan / penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, pemeriksaan atau penilaian terhadap pengelolaan dana serta pengelolaan dana bergulir, termasuk didalamnya kinerja fasilitator dan penanganan masalah. Kegiatan ini dapat juga dengan melibatkan fasilitator dari lokasi kecamatan lain yang berbeda dengan kecamatan yang akan diaudit (audit silang). Mengenai mekanisme, indikator, parameter dan langkah kerja dalam kegiatan audit internal ini disusun dalam sebuah panduan tersendiri. Pemeriksaan Eksternal Struktural. Pemeriksaan eksternal struktural secara resmi akan dilaksanakan oleh BPKP selaku auditor yang telah ditetapkan dalam Loan Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor (Bank Dunia). BPKP dapat bekerja sama dengan Inspektorat. Untuk kegiatan pemeriksaan ini, BPKP akan mengeluarkan petunjuk pemeriksaan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan sebagai acuan pemeriksaan.

Secara konseptual, pengawasan terhadap pemerintah dapat dilakukan secara formal dan informal, baik eksternal maupun internal. Lembaga legislatif (DPRD) Kabupaten Simeulue, selain berfungsi sebagai legislasi dan menyetujui anggaran (budjeting) juga melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur. Sementara bila terjadi penyimpangan yang mengarah pada kriminalitas, pengawasan juga

dapat dilakukan oleh aparat kepolisian, dan pelanggaran yang mengarah kepada korupsi juga dilakukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

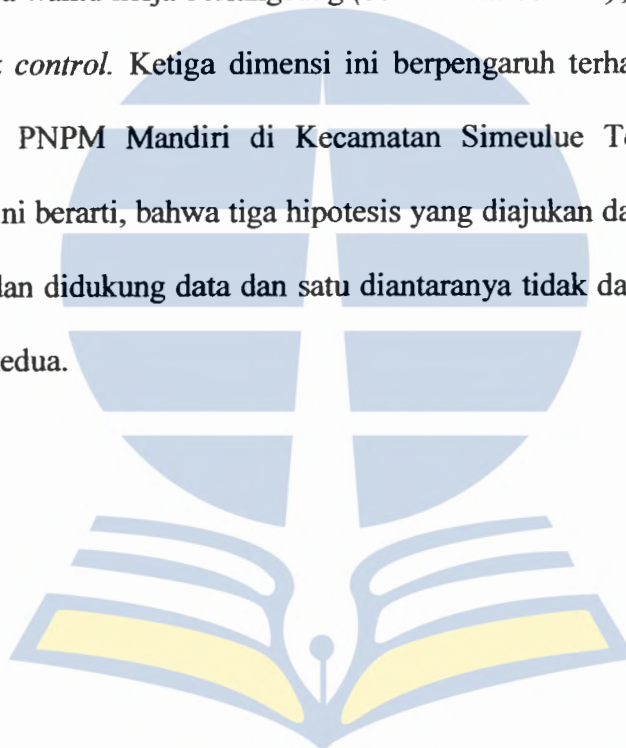
Pengawasan informal-eksternal dapat dilakukan oleh *civil society* melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat, media massa, bahkan akademisi. Pengawasan formal-internal dilakukan oleh Inspektorat dan instansi vertikal pusat, seperti Badan Pengawasan Keuangan (BPK), BPKP, Inspektorat Jenderal (Irjen) untuk pengawasan administratif. Sementara pengawasan formal-internal juga dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Berdasarkan pembahasan secara umum analisis *over all* (menyeluruh) dengan menggunakan alat analisis ANOVA ternyata keempat dimensi-dimensi pengawasan tersebut berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simelule Tengah. Agar pengawasan itu akuntabel harus dibuat alat ukur yang terukur. Yaitu memperluas kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kapasitas, kinerja lokal dan berpihak pada orang miskin dan kesetaraan jender, rendahnya tingkat korupsi dan tingginya tingkat pengembalian investasi sebab sifatnya adalah bergulir kepada masyarakat lokal yang membutuhkannya.

Tentu saja setiap dimensi itu harus ada alat ukur yang terukur. Sebab tidak akan mungkin bisa dilakukan pengawasan tanpa adanya suatu perangkat kriteria (alat ukur) yang terukur sebelumnya untuk mengukur penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik. Misalnya, alat ukur suhu “termometer” suatu alat ukur yang telah terukur (terhandal) dan memiliki presisi (ketepatan, ketelitian) untuk mengukur suhu panas dan dingin. Jika tidak ada alat ukur sebagai dasar melakukan pengawasan juga akan bias. Bias adalah distorsi pengukuran yang tidak akurat, sehingga akan sulit mengetahui apakah ada penyimpangan atau

tidak, karena alat ukurnya tidak handal dengan membuat petunjuk pelaksanaan audit keuangan dan audit kinerja PNPM Mandiri perdesaaan/perkotaan semuanya itu dilakukan agar penggunaan dana itu benar-benar akuntabel.

Akhirnya, dari berbagai perhitungan, analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan sebelumnya, dapatlah dikemukakan bahwa ternyata dimensi pengawasan yang diciptakan Winardi (2000: 259) yang mengatakan kesuksesan pengawasan terdiri dari pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan feed back (*feed back control*). Ketiga dimensi ini berpengaruh terhadap akuntabilitas penyaluran dan PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue. Hal ini berarti, bahwa tiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima dan didukung data dan satu diantaranya tidak dapat diterima yaitu hipotesis yang kedua.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas Penyaluran Dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue dengan simpulan yaitu:

1. Dimensi pengawasan pendahuluan berpengaruh terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue. Artinya, pengawasan pendahuluan yang dilaksanakan selama ini sebagai salah satu dimensi pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.
2. Dimensi pengawasan pada waktu kerja berlangsung berpengaruh terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue. Artinya, pengawasan pada waktu kerja berlangsung yang dilaksanakan selama ini sebagai salah satu dimensi pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.
3. Dimensi pengawasan *feed back* berpengaruh terhadap akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu. Artinya, pengawasan *feed back* yang dilaksanakan selama ini sebagai salah satu dimensi pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas

penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.

Jika dilakukan pengujian simultan (secara serempak/bersama-sama) dimensi pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada waktu kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan feed back (*feed back control*) secara bersama-sama mempengaruhi akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuleu sebesar 79.4%. Sedangkan sisanya 20.6% dijelaskan oleh variabel residualnya atau variabel lain yang tidak diteliti (epsilon) dalam penelitian ini, misalnya etika, moralitas dan tata nilai serta ketegasan pimpinan, sarana dan prasarana, lingkungan kerja dan lain-lain.

B. Saran

1. Agar dimensi pengawasan pendahuluan semakin baik untuk meningkatkan akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah sebaiknya dilakukan pertemuan-pertemuan secara terjadwal dan teradministrasi para petugas lapangan untuk agar tidak menyimpang dari ketentuan yang dipedomani bersama.
2. Pengawasan pada waktu kerja dapat dilaksanakan dengan speksi mendadak oleh pimpinan untuk memantau apa yang sedang dikerjakan petugas PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah, dengan speksi mendadak diharapkan pegawai akan tetap bekerja akuntabel.
3. Melakukan pengawasan dengan mengharapkan feed back (*feed back control*) harus disertai dengan ketegasan pimpinan melakukan follow-up seperti memberikan sanksi dan pujian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto. Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Atmosudirdjo. Prajudi. (1982). *Administrasi dan Management Umum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- BAPPENAS. (2007). *Modul Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik.
- BAPPENAS. (2007). *Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik.
- Djoko Susilo, (2005). *Good Governance Melalui Implementasi SAKIP, Kementrian* Pendayagunaan Aparatur Negara, Jakarta.
- Hughes. O. E., (1998). *Public Management and Administration: An Introduction*, Australia: McMillan Press Ltd
- UNDP. (1997). *Policy Document Governance for Sutainabele Human Development* Published for the United Nations. Development Programme. (UNDP). New York: Oxford University Press.
- LAN. (2004). *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua)*, Jakarta.
- LAN-Pusdiklat SPIMNAS. (2004). *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANDI
- Rusidi. (2003). *Metode dan Teknik Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana Unpad
- Russel, E. W, (2005) *Good Governance and the Evidence Base (Power Point Presentation)*, Monash University, Melbourne Australia
- Schermerhorn, Jhon R. (2003). *Manajemen*. Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta : Andi
- Siagian, Sondang. (2006). *Filsafat Ilmu Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara

Sitorus Monang. (2010). *Pengaruh Pemberdayaan dan Pengawasan Terhadap Perilaku Pegawai Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan*". Bandung :Pasca Unpad.

Sitorus Monang. (2011). Pengaruh Dimensi-Dimensi Pengawasan Terhadap Perilaku Aparatur Dalam Pelayanan Perijinan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Medan. *Majalah Ilmiah Unikom Bandung. Vol 7 No 1*

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES

Stoner, James.A.F., Freeman, Edward R., Gilbert JR.Daniel R. (1996). Jilid I dan II. *Manajemen*. Diterjemahkan Alexander Sindoro. Jakarta : PT INDEKS GRAMEDIA

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana. (1999). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.

George R. Terry.(2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara,

Winardi. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Management*. Bandung: Alumni

World Bank. (1997), *World Development Report (Summary)*, Washington D.C.:World Bank

Peraturan Perundangan

TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden No 9 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Sistem AKIP.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

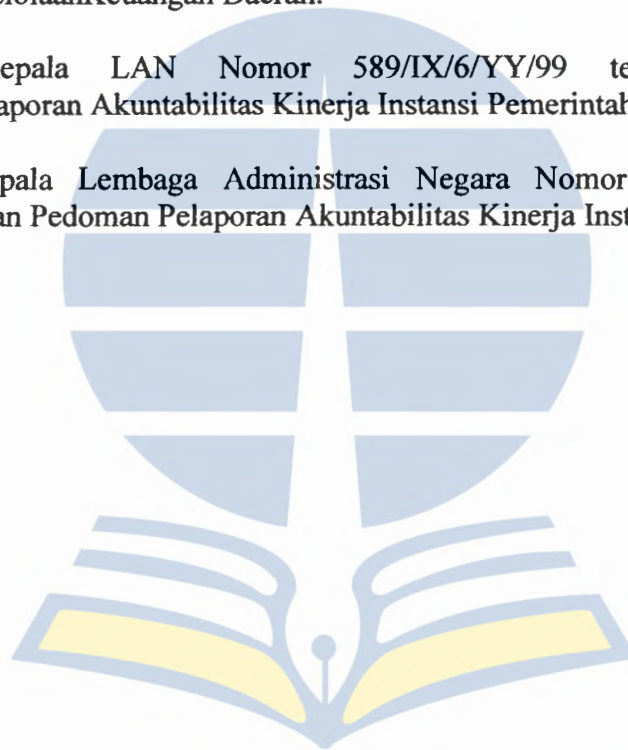
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja.

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/YY/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KUESIONER

Assalamu'alaiku,wr.wb.

Kuesioner ini dimaksud untuk penulisan karya akhir yang bersifat ilmiah sebagai persyaratan tugas akhir pada Program Magister Sain Ilmu Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, dengan judul. **PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA PNPM MANDIRI DI KECAMATAN SIMEULUE TENGAH KABUPATEN SIMEULUE.**

- a. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Bapak/ibu diminta untuk memberi tanda silang (x) pada salah satu kolom yang tersedia.
- b. Yakinkan bahwa Bapak/Ibu tidak menyilangkan lebih dari satu jawaban dan tidak terdapat pertanyaan yang belum dijawab/terlewatkan.
- c. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat langsung pada proses penerima dana PNPM se kecamatan simeulue tengah.
 1. = Sangat Tidak Baik
 2. = Santat Kurang Baik
 3. = Baik
 4. = Sangat Baik
 5. = Sangat Sangat Baik

1 IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :.....(boleh tidak diisi)
2. Usia :Tahun
3. JenisKelamin : Laki-laki / Perempuan
4. Pendidikan :
5. Nama Desa :.....

No	Pernyataan Variabel Pengawasan (X1)	Alternatif Jawaban				
		SSB	SB	B	SKB	STB
		5	4	3	2	1
I.A.	Pengawasan Pendahuluan (<i>preliminary control</i>) (X1.1)					
1	Kejelasan target dibutuhkan sebelum dilakukan pengawasan					
2	Kejelasan standar waktu penyelesaian target penting dalam Pengawasan					
3	Kesesuaian metode pengukuran dibutuhkan dalam pengawasan					
4	Kepatuhan terhadap peraturan harus ditegakkan ketika melakukan pengawasan					
I.B.	Pengawasan Pada Waktu Kerja Berlangsung (<i>concurrent control</i>) (X1.2)					
5	Intensitas pengukuran tercapai harus dipertahankan ketika melakukan pengawasan					
6	Bentuk pengukuran harus disepakati ketika melakukan pengawasan					
7	Penyimpangan yang terjadi saat kegiatan berlangsung harus segera diatasi					
8	Capaian target yang diinginkan merupakan kesepakatan bersama					
9	Sanksi bila target tidak tercapai perlu ditegakkan					
I.C.	Pengawasan <i>Feed Back</i> (<i>feed back control</i>, X1.3)					
10	Upaya perbaikan target (hasil) disesuaikan dengan kemampuan pegawai					
11	Upaya pelaksanaan pengukuran dilakukan secara teratur					
12	Penjatuhan hukuman bagi pegawai yang menyimpang ditentukan oleh tim yang independen					
II	Akuntabilitas (Y)					
II.a.	Akuntabilitas Politik (Y1.1)					
13	Standardisasi akuntabilitas dibuat sesuai kesepakatan dan kepentingan					
14	Akuntabilitas secara prosedural harus di pedomani bersama dan dilaksanakan					
15	Publikasi laporan kepublik merupakan keharusan dalam organisasi publik					
16	Sebelum dipublikasikan terlebih dahulu di audit akuntan publik yang independen					
17	Kontrol dari masyarakat dibutuhkan penyaluran dana PNPM Mandiri					
II.b.	Akuntabilitas financial (Y1.2)					

18	Ketaatanpetugaskepadaperaturan dibutuhkan dalam penyaluran dana PNPM Mandiri					
19	Bagaimana integritas petugas PNPM Mandiri					
20	Pekerjaandapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan dana yang digunakan					
21	Penyaluran dana PNPM Mandiri harus mengikutiprinsip-prinsipkeuangan					
22	Petugas PNPM Mandiri harus dapat membuatlaporankeuangan					
II.c	Akuntabilitas Administratif (Y1.3)					
23	Prosedural administrasi harus diikuti agar akuntabel					
24	Moralitas petugas dibutuhkan ketika menjalankan administrasi					
25	Etika petugas PNPM Mandiri mutlak dianuti dalam bekerja					
26	Kepastianhukum kepada yang menyimpang dari penggunaan dana PNPM Mandiri penting					
27	Setiap petugas PNPM Mandiri harus memilikinilai					
28	Azaskepatutan harus diikuti setiap petugas ketika bekerja					



LAMPIRAN 1 : DATA ORDINAL HASIL PENILAIAN RESPONDEN

VARIABEL Pengawasan

wasan Pendahuluan					VARIABEL Pengawasan Pada Saat Kerja						VARIABEL Feed Back				
No	1	2	3	X1	5	6	7	8	9	X2	No	10	11	12	X3
1	3	3	3	9	4	3	3	3	3	16	1	4	4	4	12
2	4	4	4	12	4	4	4	3	3	18	2	4	4	4	12
3	4	4	4	12	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	12
4	4	4	4	12	3	4	4	4	3	18	4	3	4	4	11
4	4	4	4	12	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	12
6	3	4	3	10	4	3	4	3	4	18	6	4	3	4	11
7	4	4	3	11	4	4	4	4	4	20	7	4	4	4	12
8	4	4	3	11	2	3	2	2	3	12	8	3	2	2	7
9	4	4	4	12	4	3	3	4	4	18	9	4	3	4	11
10	4	4	3	11	4	4	3	4	4	19	10	4	4	4	12
11	4	4	4	12	4	3	4	4	4	19	11	4	4	4	12
12	3	4	4	11	4	4	4	4	4	20	12	4	4	4	12
13	3	3	3	9	2	2	4	1	4	13	13	2	3	2	7
14	3	3	3	9	3	3	3	3	2	14	14	2	2	3	7
14	3	3	3	9	3	2	3	3	2	13	14	2	2	3	7
16	4	4	4	12	4	4	4	4	4	20	16	4	3	3	10
17	3	3	3	9	3	3	2	3	3	14	17	3	3	3	9
18	3	3	4	10	4	4	4	4	4	20	18	4	3	3	10
19	3	3	4	10	4	3	3	4	4	18	19	4	3	4	11
20	2	2	2	6	2	3	2	2	2	11	20	2	3	2	7
21	3	4	3	10	4	4	4	4	4	20	21	4	4	3	11
22	2	3	2	7	3	2	2	1	3	11	22	3	2	2	7
23	3	3	4	10	4	4	4	4	4	20	23	4	4	4	12
24	4	3	4	11	4	4	4	3	3	18	24	3	4	4	11
24	3	3	4	10	4	3	3	3	4	17	24	4	3	4	11
26	3	3	3	9	3	3	4	4	4	18	26	4	4	4	12
27	3	3	4	10	2	3	3	2	4	14	27	4	4	4	12
28	3	4	4	11	4	4	3	3	4	18	28	3	4	4	11
29	4	4	3	11	4	4	4	4	4	20	29	4	4	4	12
30	3	3	3	9	4	4	4	4	4	20	30	4	4	4	12
31	4	4	4	12	4	4	4	4	4	20	31	4	3	4	11
32	3	3	3	9	2	2	3	2	2	11	32	4	4	4	12
33	3	4	4	11	4	3	3	4	4	18	33	4	3	4	11
34	4	4	3	11	4	3	3	3	3	16	34	4	4	4	12
34	4	3	3	10	4	4	4	4	4	20	34	4	4	3	11
36	4	3	4	11	3	4	4	3	4	18	36	4	4	4	12
37	3	3	3	9	2	3	3	2	2	12	37	2	2	2	6
38	4	4	4	12	4	4	3	3	3	17	38	2	3	3	8
39	4	4	4	12	4	4	3	4	4	19	39	3	4	4	11
40	4	3	3	10	3	3	4	4	4	18	40	4	4	4	12
41	4	4	2	10	4	3	4	4	3	18	41	4	4	4	12
42	4	3	4	11	4	4	4	4	4	20	42	4	4	4	12
43	4	4	4	12	4	4	4	4	3	19	43	3	4	4	11

**LAMPIRAN 2 : DATA ORDINAL HASIL PENILAIAN RESPONDEN UNTUK
VARIABEL Akuntabilitas**

No	1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	Y
1	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	54
2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	62
3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	59
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	3	4	4	4	4	59
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
6	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	59
7	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	62
8	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	58
9	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	62
10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	62
11	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	61
12	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
14	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47
14	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	45
16	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	58
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
18	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	55
19	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
20	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	36
21	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	58
22	2	3	2	2	2	3	3	2	2	1	3	2	2	2	2	3	36
23	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	60
24	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	61
24	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	55
26	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	52
27	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	55
28	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	59
29	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	58
30	3	3	3	1	1	4	1	3	3	4	4	1	1	1	1	3	58
31	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	62
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
33	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63
34	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63
34	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	56
36	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	59
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
39	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	60
40	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	58
41	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	60
42	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	63

44	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	58
44	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	62
46	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	55
47	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63
48	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	59
49	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
49	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63
42	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	62
43	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	56
44	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	58
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	63
46	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	55
47	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
48	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	60
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
60	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	60
61	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
62	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	58
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	63
64	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	62
64	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	55
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
67	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	58
68	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	59
69	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	59
70	4	3	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
71	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	59
72	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	62
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63
74	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	60
74	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	61
76	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	58
77	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	59
78	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	62
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
81	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	62
82	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	59
83	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	62
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	63
84	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	62
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
88	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	58
89	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63
90	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
93	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	61
94	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	59
94	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	61
96	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	58
97	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	59

**LAMPIRAN 3 : DATA ORDINAL HASIL PENILAIAN
RESPONDEN TENTANG PENGAWASAN**

Respo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jlh
1	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	28
2	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	47
3	2	3	2	2	2	3	3	4	2	3	4	2	32
4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	43
5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
6	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	42
7	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	41
8	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	41
9	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	43
10	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	43
11	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	44
12	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	45
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
14	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	46
15	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	45
16	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	41
17	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
21	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	44
22	4	4	2	4	4	3	4	4	4	2	4	2	41
23	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
25	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	44
26	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	45
27	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	41
28	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	45
29	4	4	3	3	3	4	4	4	3	2	4	3	41
30	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	45

**LAMPIRAN 4 : DATA ORDINAL HASIL PENILAIAN
RESPONDEN TENTANG AKUNTABILITAS**

Respo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	jumlah
1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	63
3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	58
4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	62
5	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	55
6	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63
7	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	59
8	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
9	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	58
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63
11	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	62
12	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	56
13	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	58
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	63
15	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	55
16	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
17	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	60
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
19	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	60
20	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	62
21	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	58
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	63
23	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	62
24	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	55
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
26	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	58
27	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	59
28	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	59
29	4	3	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
30	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	59

X1	X2	X3	X	X1	X2	X3	X	X1	X2	X3	X
9	16	12	37	9	11	12	32	12	20	12	44
12	18	12	42	11	18	11	40	12	20	9	41
12	20	12	44	11	16	12	39	12	20	12	44
12	18	11	41	10	20	11	41	12	20	12	44
12	20	12	44	11	18	12	41	10	19	11	40
10	18	11	39	9	12	6	27	11	19	12	42
11	20	12	43	12	17	8	37	9	18	12	39
11	12	7	30	12	19	11	42	11	19	11	41
12	18	11	41	10	18	12	40	11	20	12	43
11	19	12	42	10	18	12	40	12	20	12	44
12	19	12	43	11	20	12	43	12	19	12	43
11	20	12	43	12	19	11	42	11	20	11	42
9	13	7	29	10	20	11	41	12	19	11	42
9	14	7	30	11	20	11	42	10	20	12	42
9	13	7	29	11	13	6	30	12	20	12	44
12	20	10	42	12	20	12	44	11	20	10	41
9	14	9	32	11	18	9	38	12	20	12	44
10	20	10	40	11	18	11	40	9	11	12	32
10	18	11	39	10	20	10	40	11	19	11	41
6	11	7	24	12	20	12	44	12	19	10	41
10	20	11	41	11	19	11	41	11	17	11	39
7	11	7	25	10	18	12	40	12	20	11	43
10	20	12	42	12	18	12	42	12	19	12	43
11	18	11	40	12	20	11	43	12	20	12	44
10	17	11	38	10	18	12	40	12	20	12	44
9	18	12	39	11	18	12	41	12	18	11	41
10	14	12	36	11	19	12	42	12	19	9	40
11	18	11	40	12	20	12	44	12	19	11	42
11	20	12	43	12	20	11	43	12	20	12	44
9	20	12	41	11	20	12	43	12	20	12	44
12	20	11	43	12	20	8	40	12	20	12	44
								11	20	11	42
								11	20	12	43
								10	16	9	35
								10	20	11	41